

LAPORAN HASIL PENELITIAN

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL

(Studi Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Daerah Akibat Dampak
Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)



Oleh:

Dra. Sri Weningsih
Drs. Muslih Faozanudin, M.Sc.

UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAGA PENELITIAN
PUSAT STUDI INDONESIA
2000

LEMBAR PENGESAHAN LAPOAN HASIL PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN-UT

1. a. Judul Penelitian : EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (Studi Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Daerah Akibat Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)

b. Bidang Ilmu : Administrasi Pembangunan

2. Ketua Peneliti

a. Nama : Dra. Sri Weningsih

b. NIP : 131 787 023

c. Golongan/Pangkat : III d / Penata

d. Jabatan : Lektor

e. Fakultas/Unit Kerja : FISIP/UPBJJ-UT Purwokerto

3. Anggota Peneliti

a. Jumlah Anggota : 1 (satu) orang

b. Nama /NIP/ Gol/Pangkat : Drs. Muslih Faozanudin, M.Sc./131996101/ IIIc/Penata

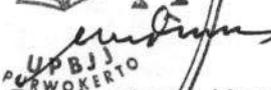
4. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

5. Biaya penelitian : Rp. 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Purwokerto, 15 Oktober 2000

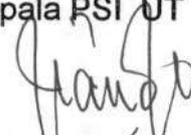
Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Purwokerto

Ketua Peneliti:

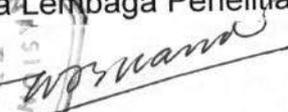

Drs. Lestanto Unggul Widodo, MS
NIP. 130 801 794


Dra. Sri Weningsih
NIP. 131 787 023

Menyetujui:
Kepala PSI UT


DR. Tian Belawati
NIP 131 569 974

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian UT,


WBP. Simanjuntak, M.Ed., Ph.D
NIP 130212017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala bimbingan dan hidayahnya sehingga penelitian yang mengambil judul " EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (Studi Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Daerah Akibat Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)" dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini memfokuskan pada aspek implementasi kebijakan publik khususnya di lihat dari dimensi sasaran program. Hal ini mengingat program JPS-PDEM DKE, merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin, khususnya yang terkena dampak krisis ekonomi. Penelitian ini diadakan karena peneliti sadar bahwa setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat bawah sangat syarat dengan deviasi baik yang terkait dengan masalah prosedur, maupun dana yang menjadi hak masyarakat bawah.

Dengan selesainya penelitian ini tim peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor dan Kepala Pusat Studi Indonesia Universitas Terbuka atas dana yang diberikan untuk kegiatan penelitian ini.
2. Kepala UPBJJ-UT Purwokerto, yang telah mambantu dan memberikan ijin kegiatan penelitian.
3. Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas atas ijin dan kemudahan yang diberikan dalam penelitian ini.

4. Para responden yang telah meluangkan waktunya guna memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa buku laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi sempurnanya laporan ini.

Namun demikian semoga buku laporan penelitian ini tetap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat mendalami masalah implementasi kebijakan.

Purwokerto, 15 Oktober 2000

Tim Peneliti

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Efektifitas Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial: Studi Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Daerah Akibat Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) Di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas” tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketepatan penyaluran dana JPS sesuai dengan kelompok sasaran (*target group*) yang tepat, dan mengevaluasi penggunaan dana oleh kelompok kelompok sasaran .

Untuk mendukung penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode campuran antara kualitatif dengan kuantitatif, dengan metode utama kualitative deskriptive. Untuk mengambil data digunakan tehnik wawancara dengan menfokuskan pada sampel kelompok sasaran dan para pengelola program. Dengan demikian sampel yang digunakan adalah dua macam, yaitu sampel acak dan sampel non-acak.

Berdasarkan pada hasil analisis di depan maka dapat disimpulkan bahwa program penyaluran dana jaring pengaman sosial (JPS) PDM-DKE membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Namun demikian manfaat yang besar ini tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang tepat, sehingga sasaran dari program untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif tidak dapat tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah Pola penyaluran yang kurang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dimana pola yang digunakan cenderung menganut model unifromity, yang harus sama antara desa yang satu dengan desa yang lain, padahal kondisi sosial masyarakat berbeda-beda. Akibatnya pola dan sistem penyaluran dana juga kurang sesuai dengan yang dikehendaki program. Pemanfaatan dana di kelompok sasaran cenderung tidak sesuai dengan peruntukan dana tersebut, misalnya memanfaatkan dana JPS untuk kegiatan konsumsi dan kebutuhan lain yang mendesak.

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat di ajukan dalam laporan penelitian ini antara lain. *Pertama*, Pola penyaluran dana program JPS tidak harus sama antara desa yang satu dengan desa yang lain, namun disesuaikan dengan kondisi desa setempat. *Kedua*, sasaran kegiatan di tingkat pokmas memerlukan fleksibilitas, sehingga pemanfaatan dana program di tingkat masyarakat tidak terbatas pada penggerakan ekonomi masyarakat, melainkan lebih pada penyadaran masyarakat ke arah perilaku produktif. *Ketiga*, bagaimanapun baiknya program, maka perlu diikuti dengan pembinaan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka menciptakan kemandirian.

SUMMARY

This research is entitled " the affectivity of Implementation of Social Safety net : The Evaluation of implementation of economic recovery program in Patikraja District, Banyumas Regency" . This research is aimed at evaluating of the appropriateness of the JPS Fund allocation to the target group and evaluating of the utilizing of it by target group

To develop further research, a mixed method was conducted, a qualitative which was combined with and a quantitative. Data collecting used interview focused on selected sample (purposive) of program administrative group and random sample of the target group JPS.

A set of conclusion of this research could be drawn that the level of achieved the allocation of social safety net program has benefited for the poor community. But this has not been balanced by the appropriate administrative system. As a result the main aim of the program could not be optimally achieved. One of the causal factors is the uniformity of program design in which the pattern and procedure of program activity is nationally the same. Hence, the result of the above is the utilizing of money by target group has not tended to be purposeful, i.e., many of them used the money for meting the consumptive need.

Based on these finding, a number of suggestions can be made, *First*. The allocating pattern of funds should consider the heterogeneity of community in which, the have own habit and culture. Therefore, it should be suited to endogenous condition. *Second*, The flexibility of the program should be conducted. Therefore, the utilizing of JPS fund not only for generating economic activity, but the more important is giving the consciousness of people with productive behavior. *Finally*, empowerment is vital for community especially for their self-autonomy

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
A. Tujuan Penelitian	17
B. Manfaat Penelitian	17
BAB IV. METODE PENELITIAN	18
BAB V. HASIL PENELITIAN	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	23
B. Gambaran Umum Implementasi Program PDM-DKE....	30
C. Pengalokasian Dana PDM-DKE	33
1. Sasaran penerima Program	34
2. Sasaran Kegiatan Program	40
D. Pengelolaan dan Pemanfaatan Program PDM-DKE	54
1. Sistem Pengelolaan Program	54
2. Pemanfaatan Program.....	63
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI	
PEDOMAN WAWANCARA	

DAFTAR TABEL

No.		Hal.
1.	Daftar Jumlah Responden Untuk Masing-Masing Jenis Di Desa Kedungwringin, Kedungrandu Dan Notog.	20
2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Patikraja Berdasarkan Umur Tahun 1999	26
3.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Kecamatan Patikraja, Tahun 1999	27
4.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Patikraja Tahun 1999	28
5.	Jenis Dan Jumlah Sarana Perekonomian Di Kecamatan Patikraja, Tahun 1999	29
6.	Jumlah Penduduk Di Kecamatan Patikraja Tiap-tiap Desa Berdasarkan Kriteria Pra-KS, KS-1 Dan Pengangguran	30
7.	Alokasi Anggaran Dana JPS PDM-DKE Kecamatan Patikraja Tahun 1998/1999	31
8.	Jumlah KK Miskin Dan Sasaran Penerima Program PDM-DKE Tahun 1998/1999	36
9.	Jumlah Keterlibatan Kelompok Sasaran Dalam Kegiatan Fisik Program PDM-DKE Di Tiga Desa.	37
10.	Sasaran Kegiatan Program PDM-DKE Non-Fisik (Ekonomi) Di Desa Kedungwringin, Kedungrandu Dan Notog, Tahun 1998/1999	39
11.	Proporsi Alokasi Dana PDM-DKE Untuk Kegiatan Fisik Di Ke Tiga Desa Tahun 1998/1999	42
12.	Jenis Kegiatan Proyek Fisik Dana Program PDM-DKE Tahun 1998-1999	44
13.	Alokasi Dana PDM-DKE Tahun 1998/1999 Untuk Kegiatan Non-Fisik	45
14.	Jenis Kegiatan Proyek Non-Fisik (Ekonomi) Dana Program PDM-DKE Tahun 1998-1999	47
15.	Jenis Dan Jumlah Pokmas Di Tiap-Tiap Desa Di Kecamatan Patikraja	50
16.	Perkembangan Dana PDM DKE Kegiatan Simpan Pinjam Dan Penambahan Modal Usaha Per Agustus 2000 (Selama 18 Bulan)	55

No.		Hal.
17.	Data Perkembangan Jumlah Kambing Di Desa Notog, Kedungrandu Dan Kedungwringin, Per Agustus 2000 (Selama 18 Bulan)	60
18.	Distribusi Frekwensi Jawaban Responden Atas Pengetahuan Anggota Pokmas Dalam Pengelolaan Dana JPS PDM-DKE..	61
19.	Distribusi Ferkewensi Rata-Rata Besanya Pinjaman Pokmas	64
20.	Distribusi Ferkewensi Rata-Rata Pemanfaatan Dana Pinjaman Oleh Pokmas	65
21.	Distribusi Ferkewensi Rata-Rata Pemanfatan Dana Oleh Anggota Pokmas (Selama 18 Bulan).	66
22.	Distribusi Frekwensi Rutinitas Pengembalian Dana Pinjaman.	67

Universitas Terbuka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997, mempunyai dampak luas dan bersifat multidimensional. Hal ini bukan saja terganggunya kegiatan ekonomi rakyat, baik kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, justru yang lebih parah adalah hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama sendi ekonomi, yang ditandai dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat.

Dilihat dari kondisi ekonomi, dampak krisis ekonomi sangat besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -12 % dengan laju inflasi 66 % (Nota keuangan dan RAPBN tahun 1999/2000). Kondisi yang demikian mengakibatkan harga-harga yang melambung tinggi, kegiatan produksi macet, yang selanjutnya merambah pada bangkrutnya sebagian besar perusahaan dan badan-badan usaha sebagai tempat pencari nafkah. Sehingga suatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya perampingan dan penutupan sebagian perusahaan, yang berbuntut pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal. Maka pengangguran pun meningkat tajam, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Sehingga tidak dapat dihindarkan bahwa krisis ini membawa pada proses pemiskinan yang begitu dahsyat di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, pada awal tahun 1998, Jumlah penduduk miskin yang berkategori miskin meningkat menjadi 80 juta. Dimana 40 juta termasuk

dalam kategori Keluarga prasejahtera dan jumlah pengangguran penuh mencapai 6,37 juta orang. Padahal kondisi sebelum krisis jumlah tersebut tidaklah separah seperti di atas. Hal ini seperti data yang diperoleh dari BPS bahwa pada tahun 1993 jumlah keseluruhan penduduk miskin berkisar 16 juta jiwa atau 13,6 persen dari keseluruhan penduduk Indoensia, Dari jumlah itu , 22,5 juta jiwa diantaranya atau 13, 3 persen hidup dibawah garis kemiskinan, yang terbagi atas 7,2 juta jiwa (97 %) berada di perkotaan dan 15, 3 juta jiwa (12,3 %) berada di pedesaan. Kondisi kemiskinan selanjutnya terjadi penurunan sebesar 3,7 juta jiwa 1996 sehingga total penduduk miskin menjadi 22, 5 juta jiwa,

Dalam rangka usaha mengamankan kondisi di atas, pemerintah telah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau *social safety Net* . Program ini merupakan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan jatuh miskin akibat krisis ekonomi, dengan kegiatan yang diarahkan seperti tersebut di atas. Dalam program ini pemerintah telah mengalokasikan dana periode 1998/1999 sebesar 17, 9 triliun, yang peruntukan untuk sektor yang dinilai vital dan sangat dibutuhkan masyarakat; antara lain: ketahanan pangan, perlindungan sosial, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan serta kredit murah. Dari jumlah tersebut di atas terbagi menjadi dua alokasi yaitu: 9,3 triliun digunakan untuk program inti JPS sedangkan sisanya sebesar 8,6 triliun digunakan sebagai biaya untuk program pendukung JPS. Untuk alokasi pendukung ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain 2,3 triliun sebagai

dana rool-over anggaran tahun lalu, 5,8 triliun sebagai dana inti pendukung JPS; 171,9 miliar sebagai dana monitoring (Kompas, 17 Mei 1999). Sedangkan Sumber dana berasal dari bantuan luar negeri yang disalurkan lewat IMF, Bank Dunia, ADB, Bank Exim Amerika dan bantuan lain dari negara Donor.

Dari dana tersebut di atas, kegiatan JPS dapat dikelompokkan menjadi empat program kegiatan yaitu:

- a. Program ketahanan pangan: Program yang diarahkan untuk menjamin tersedianya bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Program padat Karya dan penciptaan lapangan kerja (employment cretaion): Program yang diarahkan untuk mengurangi angka pengangguran serta sekaligus mendorong usaha produktif yang dapat berlanjut setelah program berakhir.
- c. Program perlindungan sosial (Social Protection), Program yang diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
- d. Program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha pengembangan industri kecil dan menengah (support for small and medium enterprise) yang dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, bimbingan, dana promosi, dan kemitraan. Salah satu diantara program itu antara lain Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi.

Dari ke empat pengelompokan seperti di atas, kegiatan JPS sangatlah kompleks dan luas, karena menyangkut hampir seluruh kegiatan sendi perekonomian negara dan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan yang tercakup didalamnya juga cukup kompleks. Berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah, ada 5 macam program JPS antara lain:

1. Pemberdayaan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE)
2. Peningkatan Lapangan kerja produktif (PLKP)
3. Pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah dana operasi pemeliharaan Puskesmas dan program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
4. Pelayanan Pendidikan dasar termasuk didalamnya adalah dana operasi pemeliharaan SD dan Pembinaan olah raga Pemuda
5. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat (PESM) termasuk didalamnya program P3DT, PPK dan P2KR (Tim Koordinasi P3JPS PM 1999)

Karena begitu banyaknya program JPS terutama dalam implementasinya, penelitian ini menfokuskan pada salah satu kegiatan JPS, yang berbentuk PDM-DKE. Pengambilan fokus ini dikarenakan program ini banyak menyangkut kehidupan langsung ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya pemberian modal bagi pengembangan usaha di masyarakat.

Adapun tujuan dari PDM-DKE adalah.

1. Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di pedesaan, dan perkotaan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
2. Menggerakkan kembali ekonomi rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana ekonomi sosial yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang dan jasa.
3. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup (Bedoman Umum JPS, Tim Koordinasi P3JPS PM, 1999)

PDM-DKE, seperti program-program pembangunan lainnya, sangat rentan dalam dimensi implementasinya. Karena setiap kegiatan implementasi banyak aspek dan faktor yang terlibat. Sehingga penyimpangan sangat mungkin terjadi. Apalagi bila melihat struktur program JPS yang merupakan program instant tanpa ada penelitian yang mendalam, yang harus melalui beberapa tingkat dan jalur dalam proses implementasinya. Apa yang dikemukakan oleh Deputi Kepala Bapenas bidang ekonomi, yang menyatakan bahwa tidak kurang dari 8 triliun dari total dana jaring pengaman sosial salah alamat merupakan contoh bentuk penyimpangan implementasi program JPS. Konteks salah alamat menurutnya bukan berarti bocor, tapi memiliki esensi yang sama, yaitu 'ada uang hilang dan dimanfaatkan oleh orang yang tak berhak' (Republika, 26 April 1999) Alasan lain didasarkan pada pengalaman

bahwa, program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai program yang lebih dulu diimplementasikan, banyak mengalami penyimpangan (Faozanudin, dkk 1995). Dan bahkan jejak program dan apalagi hasil dari IDT sudah tidak berbekas lagi hingga saat ini. Dengan melihat kondisi seperti di atas tentu saja program ini sulit untuk mencapai target dan sasaran, apalagi kelanjutan program ini.

Melihat dan menyoroti permasalahan yang ada sangat menarik untuk diadakan suatu penelitian khususnya mengenai dimensi implementasi dari program JPS tersebut. Apalagi belum banyak yang meneliti secara mendalam tentang seberapa jauh implementasi program ini sampai pada sasaran. Tahap implementasi ini paling tidak menyangkut 3 aspek: pertama aspek alokasi dana, kedua aspek kelompok sasaran (target Group) dan terakhir aspek kelembagaan yang didalamnya terdiri dari organisasi dan pelaksana.

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah yang menerima program JPS, bagaimanapun akan mengalami hal dan kondisi yang sama. Lemahnya perencanaan dari program ini, yang tanpa didasarkan pada penelitian yang mendalam sangat memungkinkan untuk terjadi kesalahan dalam implementasinya. Berdasarkan pengamatan, banyak dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan sasaran. Untuk beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas terlihat bahwa alokasi dana JPS tidak ubahnya ada kesan seperti pemerataan pembagian dana dengan tanpa melihat urgensi sasaran dan tujuan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, Perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah dana PDM-DKE dialokasikan kepada kelompok sasaran (target group) yang tepat ?
2. Apakah dana yang sudah diterima oleh kelompok sasaran dialokasikan sesuai dengan tujuan dari program PDM-DKE ?

Universitas Terbuka

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Evaluasi implementasi

Sebelum membahas evaluasi implementasi, akan di ketengahkan konsep Implementasi kebijakan terlebih dahulu. Implementasi kebijakan merupakan bagian keseluruhan dari kebijakan itu sendiri. Ada tiga komponen dasar dari kebijakan, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran. Konsep 'cara' merupakan komponen yang berfungsi untuk melaksanakan dan mewujudkan dua komponen yang pertama dan kedua. Cara inilah yang selanjutnya disebut sebagai implementasi (Wibawa, dkk, 1994:15)

Pengertian Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier(dalam Wahab, 1991:5) dikatakan sebagai

“apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan atau dirumuskan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Sedangkan menurut Mater dan Horn (dalam wahab, 1991:64) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah diimplementasikan, walaupun telah

direncanakan sedemikian rupa. Karena pada dataran implementasi banyak sekali interelasi yang kompleks yang tidak mudah untuk dieliminir. Oleh karena itu tidaklah semua kebijakan itu mudah untuk mencapai sasaran, membuahkan hasil yang diharapkan. Gejala inilah yang dinamakan dengan *Implementation Gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan/seharusnya dengan apa yang terjadi (Wibawa,dkk. 1994:17). Atas dasar itulah evaluasi implementasi kebijakan sangat diperlukan.

Fungsi utama dari kegiatan evaluasi adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apakah proses kegiatan yang mengkombinasikan antara metarial, aktivitas dan kegiatan administasi dapat mencapai sasaran. (King, 1987:9 dkk). Demikian pula Evaluasi Program juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan yang telah digariskan dapat mencapai tujuan (Smith, 1981:241).

Definisi yang lebih luas dari evaluasi program meliputi tiga dimensi yaitu: ekonomi (economy), Efisiensi dalam pelaksanaan (operational efficiency) dan efektifitas pencapaian tujuan (effectiveness) (Rutman, 1980:18). Ekonomi mengandung arti penggunaan sumber daya yang digunakan dalam program sesuai dengan kebutuhan kualitas dan diarahkan untuk semurah mungkin biaya yang dikeluarkan. Efisiensi Operasioanal dimaksudkan sebagai usaha mencari perbandingan yang terbaik dalam usaha perubahan input untuk mencapai output yang

diharapkan. Sedangkan efektivitas menyangkut seberapa jauh pencapaian program sesuai dengan yang ditentukan. Dalam lapangan kebijakan publik, evaluasi program dapat disejajarkan dengan evaluasi kebijakan. Karena konsep program dapat dikatakan sebagai hasil dari kebijakan.

Evaluasi kebijakan menurut Bryant and white (dalam Wibawa, dkk 1994a) harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya mendekati tujuan. Hal ini sangat penting karena apa yang akan terjadi pada tahap implementasi akan mempengaruhi hasil akhir. Selanjutnya menurut Dunn, (1987: 169) evaluasi kebijakan termasuk dalam analisa restrospektif, yaitu penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan diambil.

Secara konseptual dimensi evaluasi ini memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu evaluasi implemantasi program dan evaluasi dampak program. Kedua evaluasi ini memiliki perbedaan secara substansial, karena dilihat dari dimensi waktu keduanya berbeda. Demikian pula dari segi hasil yang diharapkan. Pada model yang pertama, evaluasi lebih diarahkan pada efektivitas pelaksanaan dari program. Sedangkan yang kedua, lebih diarahkan pada ekkses yang ditimbulkan oleh program. Pada penelitian ini desain yang digunakan adalah evaluasi implementasi atas program, yang merupakan analisa yang bersifat restropeksi (Wibawa, 1994: 96). Dalam kerangka desainnya evaluasi ini tidak terlepas dari kerangka berpikir *input-output*. Artinya dalam evaluasi

atau implementasi tetap saja dilihat apa yang menjadi input dari program dan apa *output*-nya.

Dalam implementasinya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap mulus tidaknya suatu kebijakan. Edward (dalam Wibawa, 1994) misalnya menyatakan ada empat persyaratan yang dibutuhkan, antara lain: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Sedangkan Mater dan Horn (dalam Wahab, 1991:66) menyatakan ada enam variable yang mempengaruhi proses penerapan kebijakan, antara lain: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana. Ciri badan pelaksanaan, lingkungan ekonomi dan sosial, sikap para pelaksana dan prestasi kerja. Keenam variabel tersebut saling terkait untuk membentuk hasil dari kebijakan.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, implementasi kebijakan menurut Wahab (1991:49) dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu: *pemrakarsa kebijakan*; pejabat-pejabat dilapangan (*the peryphery*); dan kelompok sasaran (*target group*). Berkenaan dengan permasalahan yang ada penelitian ini lebih menekankan pada sudut pandang yang ketiga yaitu kelompok sasaran.

Dari sudut pandang ini fokus analisis implementasi tertuju pada persepsi/pandangan kelompok sasaran, yaitu sampai sejauhmana program ini mampu mengubah pola perilaku, memberikan efek pada kelompok sasaran baik jangka panjang maupun menengah.

B. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) PDM-DKE dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Seperti telah dijelaskan pada latar belakang masalah, Program JPS memiliki beberapa program yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menanggulangi kemiskinan akibat krisis ekonomi. Salah satu dari program tersebut adalah PDM-DKE.

Menurut buku pedoman JPS sasaran dari program ini antara lain:

1. Tertampungnya pencari kerja di berbagai sektor pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil menengah
3. Meningkatkan daya beli masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan melalui peningkatan pendapatan.
4. Terpeliharanya sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat
5. Terpeliharanya kelesatarian lingkungan.

Kemudian dalam penyalurannya, program Program PDM-DKE berdasarkan atas prinsip-prinsip, antara lain:

1. Program dapat dimanfaatkan langsung oleh kelompok masyarakat melalui kegiatan pembangunan (rehabilitasi) serta pengembangan usaha berskala kecil atau golongan ekonomi lemah.
2. Dalam menentukan langkah-langkah penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan atau penentuan pemberian dana PDM-DKE harus dilandaskan pada hasil musyawarah masyarakat desa.

3. Melibatkan peran serta masyarakat sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan
4. Jenis kegiatan harus dibahas melalui forum LKMD atau tokoh masyarakat dalam wadah musyawarah desa.
5. Masyarakat harus menunjukkan kesanggupan untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut atas aset-aset yang terbangun.

Sedangkan prioritas PDM-DKE diberikan kepada kegiatan usaha yang sangat memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan lapangan kerja., pendapatan masyarakat dan kegiatan usaha tersebut dijamin oleh potensi. Oleh karena itu pemberian bantuan program ini diberikan hanya kepada orang-orang tertentu yang dianggap memiliki syarat-syarat yang ditentukan. Pengertian ditentukan disini adalah mereka yang tidak memiliki akses, baik secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Demikian pula, program PDM-DKE diberikan pula kepada pihak-pihak yang kehilangan lapangan kehidupan, seperti misalnya, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain prinsip di atas, dalam rangka penyaluran maka prinsip penyaluran dari program ini adalah:

1. Penyaluran bantuan cepat sampai kepada kelompok masyarakat penerima manfaat
2. Rencana kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif (Accountability)
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri oleh wadah organisasi masyarakat setempat.

Secara konseptual program PDM-DKE sangat erat kaitannya dengan konsep kemiskinan (peverty), yaitu kondisi ketidak berdayaan (Disempowerment). Konsep ini menunjuk pada pengertian bahwa orang miskin ataupun keluarga yang miskin adalah mereka yang tidak memiliki kekuatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kondisinya bagi kehidupan (Friedman, 1991:66). Sehingga lebih tepatnya konsep kemiskinan bukan hanya kurangnya akses secara ekonomi, tetapi juga kurangnya akses dalam bidang sosial. Oleh karena itu suatu usaha rasional untuk mengentaskan mereka dari kubangan kemiskinan adalah dengan memberikan mereka kegiatan yang dapat menghasilkan (income generation) sebagai sarana pemberdayaan. Selain usaha tersebut, Friedman (1991:67-68) juga mengajukan delapan dasar model pembinaan bagi orang miskin agar memiliki kemampuan sosial dan ekonomi, antara lain:

1. *Defensible life space*: memiliki tempat yang tetap baik untuk tinggal maupun bagi kegiatan ekonominya
2. *Surplus time*: memiliki waktu luang dan istirahat yang cukup
3. *Knowledge and skill* :memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup
4. *Appropriate information*: memiliki akses informasi yang cukup

5. *Social organisation*: memiliki kesempatan untuk bergabung dengan organisasi sosial di sekitarnya sebagai sarana dalam pengembangan aktualisasi diri
6. *Social network* : memiliki jaringan sosial yang memadai
7. *Instrument of work and livelihood*: memiliki peralatan dan sarana kerja bagi kehidupannya.
8. *Financial resourcess* :memiliki sumber pendapatan.

Pertanyaan lebih jauh atas program PDM-DKE adalah, apakah program ini memberikan peluang gerak bagi orang miskin menuju akses seperti yang diungkapkan oleh Friedman tadi ? Bila melihat atas prinsip dan sasaran, program PDM-DKE seperti program-program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya seperti IDT, P3DT, PPK maupun yang lainnya dapat dipilah menjadi dua, yakni *kebijakan pada sisi produksi dan kebijakan pemasaran*. Namun demikian kebijakan yang ada sekarang secara umum masih lebih terfokus pada sisi produksi yang antara lain mencakup permodalan, pelatihan manajemen dan teknis produksi serta pengadaan bahan baku. Sementara sisi ke dua yaitu pemasaran belum tersentuh secara efektif. Kondisi ini berkaitan dengan kondisi secara umum dimana masalah usaha dan industri kecil masih kurang perhatian, yang ditunjukkan dengan kurang konsistensinya dalam bidang pembinaan. Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sadoko,dkk, (1995), bahwa program-program pembinaan atau pelayanan yang dilaksanakan sering kali sangat lemah konsistensinya. Selain masalah konsistensi, masalah

kompetensi juga masih lemah, terutama yang terkait dengan kemampuan internal institusi dalam usaha pengembangan usaha kecil.

Berdasarkan pada, tujuan sasaran dan prinsip di atas, maka dapat dikatakan bahwa Jaring Pengaman Sosial adalah salah satu program dalam mengatasi dampak krisis ekonomi sehingga lingkupnya meliputi usaha penciptaan lapangan kerja produktif bagi para penganggur baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mendasarkan pada pengertian ini program JPS merupakan upaya pemberian bantuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan melangsungkan kehidupannya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan kemiskinan semakin dalam. Dengan kata lain usaha ini merupakan model pemberdayaan bagi masyarakat miskin.

Dikatakan demikian, karena secara inherent konsep-konsep dan prinsip yang disusun dalam program ini merupakan usaha peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya sehingga lebih berdaya dari segi ekonomi maupun sosial. Program untuk peningkatan ekonomi dalam PDM-DKE misalnya, merupakan salah satu upaya dalam rangka *income generatin program*, yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat dalam rangka ketahanan ekonomi keluarga (Eade, 1997:103). Dengan menguatnya kondisi ekonomi suatu keluarga, maka akses keluarga ke berbagai sektor akan dapat dilalui.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di depan, implementasi program JPS PDM-DKE diasumsikan terjadi beberapa penyelewengan. Oleh karena itu penelitian ini akan diarahakan untuk

1. Mengevaluasi sejauh mana kesesuaian pengalokasian dana PDM-DKE, dengan kelompok sasaran (*target group*) yang dikehendaki oleh program tersebut Group),
2. Mengevaluasi tentang kesesuaian penggunaan dana yang telah diterima oleh kelompok dengan tujuan dari program.

B. Manfaat Penelitian

Karena penelitian ini dimaksudkan sebagai evaluasi atas implementasi suatu program, khususnya program pengentasan kemiskinan, diharapkan akan dapat bermanfaat dalam:

1. Memberikan gambaran tentang implementasi program PDM-DKE, terutama kesesuaian dalam hal target group maupun pengalokasian dana yang telah disalurkan.
2. Memberikan informasi tentang kemungkinan adanya kesalahan implementasi program sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi implementasi program berikutnya, maupun program yang sejenis

IV. METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

2. Sasaran Penelitian :

Sasaran penelitian adalah Para penerima Bantuan Program JPS PDM-DKE dan Aparatur Pelaksana

3. Bentuk Strategi Penelitian

Penelitian yang ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi dengan desain metode survey, dan type penelitian deskriptif. Yang dimaksud metode survey adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah variabel mengenai sejumlah besar individu melalui alat pengukur wawancara (Vredenburg, 1984:44) sedangkan Survey deskriptif dimaksudkan untuk mencari data seluas mungkin dalam rangka mempelajari kondisi sosial dari suatu kelompok manusia, hubungan antar manusia dan juga pola kelakuan manusia(ibid, hal 145).

Tehnik ini juga mencoba untuk menjelaskan dan melukiskan suatu realitas empiris sehingga dapat dibuat suatu gambaran tentang persoalan dan permasalahan yang ada.

Dengan demikian, karena perumusan masalah dan tujuan penelitian menekankan pada analisa deskriptif yang mendalam, baik

secara kuantitatif maupun kualitatif, maka pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode **gabungan** antara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif (Brannen, 1997).

4. Sampling

Karena penelitian ini merupakan penelitian dengan tehnik gabungan, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan juga terdiri dari sampel-sampel probabilitas dan sampel-sampel non probabilitas. Dalam menggunakan dua metode pengambilan sampel ini, pedoman yang harus dipegang erat adalah dalam hal keterwakilan, serta dalam memilah mengapa dan kapan saatnya menggunakan sampel probabilitas dan kapan saatnya menggunakan sampel non probabilitas (Brannen, 1997):

- a. Untuk data dengan sasaran para penerima Program PDM-DKE, digunakan random sampling, dengan besarnya sample 10 persen dari jumlah penerima. Untuk keperluan ini, responden dipikirkan yang berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda dengan jenis kegiatan yang berbeda, yaitu pokmas peternakan, pokmas usaha dagang dan pokmas simpan pinjam. Pengambilan ke tiga jenis pokmas didasarkan atas alasan bahwa, saat dilakukan penelitian ketiga pokmas tersebut masih ada walaupun sudah tidak seaktif ketika awal program digulirkan. Untuk membantu pemaparan hasil penelitian, tabel berikut menyajikan tentang daftar dan jumlah responden ke tiga pokmas dari ke tiga desa.

Tabel 1. Daftar jumlah responden untuk masing-masing jenis di desa Kedungwringin, Kedungrandu dan Notog.

Desa	Pokmas Peternakan	Pokmas Usaha Dagang	Pokmas Simpan Pinjam	Jumlah responden
Kedungwringin	10	10	13	33
Kedungrandu	8	9	15	32
Notog	9	10	21	40
Jumlah	27	29	49	105

Sumber: Data Primer diolah

b. Untuk sample dengan sasaran para aparatur pelaksana, maka digunakan non probability sampling dengan tehnik purposive sampling, yaitu memilih key informan sebagai nara sumber utama. Beberapa informan yang dipilih antara lain:

- Aparat Pemerintah Desa yang terkait dengan Pelaksanaan dan implementasi program
- Para pengurus Pokmas di tiap-tiap desa

Dengan model gabungan ini diharapkan akan dapat menggali data secara akurat dan komprehensif

5. Sumber Data

Jenis sumber data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer: data yang diperoleh dari para responden yang terdiri dari: Penerima Program Bantuan PDM-DKE dan Aparatur Pelaksana di daerah setempat

- b. Data sekunder: data yang digunakan untuk membantu menjelaskan data primer, yaitu arsip dan dokumen resmi mengenai pelaksanaan kegiatan pada masing masing lokasi penelitian.
- c. Tempat dan peristiwa yang terjadi di tempat pelaksanaan kegiatan pada masing-masing lokasi penelitian.

6. Tehnik Pengumpulan Data :

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

a Daftar Pertanyaan (Kuesioner)

Bentuk kuesioner yang digunakan dengan menggunakan semi terbuka, dan memungkinkan untuk wawancara dengan lebih panjang.

b. Wawancara (Interview).

Wawancara jenis ini tidak dilakukan dengan terstruktur yang dipandu dengan kuesioner.

c. Analisa dokumentasi,

Tehnik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada, pada masing-masing lokasi penelitian. Ini dapat berasal dari telaah arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

B. ANALISIS DATA :

Karena penelitian ini bersifat komprehensif maka tehnik analisis yang digunakan menyesuaikan dengan sasaran dan tehnik sampling yang digunakan. Sehingga lebih merupakan campuran dari beberapa model analisis. Macam tehnik yang digunakan adalah:

1. Analisis Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat bantu statistika deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengkategorikan dan menglompokkan sesuatu ke dalam kategori tertentu (Faisal, 1990),
2. Deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Dalam model ini ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dengan menggunakan model interaktif.

Analisis ini akan menggali informasi, khususnya untuk mendeskripsikan proses implementasi dari program PDM-DKE, mulai dari perencanaan di tingkat kecamatan dan desa sampai program ini di tangan masyarakat yang berhak.

V. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

Tujuan dari bab ini adalah memaparkan, menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian sesuai dengan metodologi penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mempermudah analisis tersebut bagian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Gambaran umum lokasi Penelitian.
- b. Gambaran umum Implementasi Program PDM-DKE di Kecamatan Patikraja.
- c. Pengalokasian Dana PDM-DKE di Kecamatan Patikraja
- d. Pemanfaatan dana oleh kelompok sasaran (*target group*).

Untuk lebih jelasnya keempat bagian tersebut akan di bahas lebih lanjut di bawah ini.

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak Kecamatan Patikraja,

Kecamatan Patikraja merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 30.031,3 Ha atau 44,68 Km². Kecamatan Patikraja memiliki tipologi wilayah yang terdiri atas tanah sawah, tanah kering, hutan, perkebunan dan lain-lain.

Secara goeografis, Kecamatan Patikraja memiliki batas dengan kecamatan lain yaitu:

Disebelah Utara : Kecamatan Purwokerto Selatan

Disebelah Selatan : Kecamatan Rawalow

Disebelah Barat : Kecamatan Karanglewas

Disebelah Timur : Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Rawalow

2. Jumlah Penduduk

Pada tahun 1999, jumlah penduduk di Kecamatan Patikraja sebanyak 45 595 jiwa yang dari 12.322 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut terdiri dari 22 781 penduduk laki-laki dan 22 814 penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah usia produktif, yang dihitung berdasarkan angka angkatan kerja, yaitu 13–55 tahun, sebanyak 22.007 atau 48,16 %. Angka ini mengandung arti usia ketergantungan di Kecamatan Patikraja cukup tinggi yaitu 93,29. Ini berarti setiap seratus orang penduduk usia produktif harus menanggung 93 orang penduduk tidak produktif. Data selengkapnya tentang proporsi jumlah penduduk tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Patikraja berdasarkan Umur, tahun 1999.

Golongan Umur	Jumlah	%
0 - 6 tahun	6747	14,40
7 - 12 tahun	6843	15,01
13 - 18 tahun	7020	15,40
19 - 24 tahun	5816	12,76
25 - 55 tahun	9171	20,11
56 - 79 tahun	6276	13,76
80 tahun ke atas	3677	8,06
Jumlah	45595	100

Sumber: Buku Monografi Kecamatan Patikraja tahun 1999.

Suatu hal yang menarik dari tabel di atas adalah masih tingginya jumlah usia penduduk yang berumur di atas 80 tahun yang mencapai 8,06 persen dari total jumlah penduduk. Ini merupakan suatu pertanda bahwa di wilayah kecamatan Patikraja angka harapan hidup masih cukup tinggi

Kemudian untuk lebih jauh mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk, maka perlu ditampilkan tentang struktur mata pencaharian penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Patikraja, tahun 1999.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Petani	254	4,74
2.	Nelayan	31	0,58
3.	Pengusaha sedang/besar	284	5,30
4.	Pengrajin/Industri kecil	643	12,01
5.	Buruh tani	445	8,31
6.	Buruh Industri	891	16,64
7.	Buruh Bangunan	644	12,03
8.	Pedagang	145	2,78
9.	Pengangkutan	175	3,27
10.	PNS	945	17,65
11.	ABRI (TNI + POLRI)	35	0,65
12.	Pensiunan PNS	704	13,15
13.	Pensiunan ABRI	159	2,97
	Jumlah	5355	100.

Sumber: Buku Monografi Kecamatan Patikraja tahun 1999

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh masih menduduki peringkat tertinggi, yaitu 36,98 persen, yang terdiri dari buruh tani, buruh bangunan dan buruh industri. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Namun demikian kondisi ini tidak realistik apabila dihubungkan dengan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Data selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Patikraja, tahun 1999

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum Sekolah	4559	10.00
2.	Tidak Tamat SD	2031	4,45
3.	Tamat SD/Sederajat	18341	38.23
4.	Tamat SLTP/Sederajat	18860	39,17
5.	Tamat SLTA/Sederajat	2115	4,64
6.	Tamat Akademi/Sederajat	1361	2,98
7.	Tamat Perguruan Tinggi	45	0,10
8.	Buta Huruf	193	0,42
	Jumlah	45595	100

Sumber: Buku Monografi Kecamatan Patikraja Tahun 1999

Berdasarkan data di atas dapat dilihat tentang tingkat literasi dari penduduk di kecamatan Patikraja. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki pendidikan SD ke atas adalah 85.12 persen. Sedangkan yang belum sekolah masih 10 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat literasi atau melek huruf penduduk di kecamatan Patikraja cukup baik, dimana hanya hanya 0,42 persen penduduk yang buta huruf.

3. Sarana Perekonomian.

Yang dimaksud dengan sarana perekonomian adalah sarana yang dapat digunakan sebagai kegiatan produksi baik barang maupun jasa, distribusi, pemasaran, dan kegiatan lain yang mampu menghasilkan keuntungan bagi yang memakainya. Sarana-sarana yang demikian ini sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, diharapkan semakin banyak sarana ekonomi yang ada. Di kecamatan Patikraja sarana kegiatan perekonomian yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jenis dan Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Patikraja, tahun 1999

No	Nama	Jumlah
1	Pasar Bangunan Permanen	1
2	Pasar Semi Permanen	12
3	Koperasi	
	a. Koperasi Simpan Pinjam	5
	b. Koperasi Unit Desa	1
	c. BKK	1
	d. BPKD	13
	e. UED-SP	13
4.	Toko/Kios	127
5	Kios	48
6	Warung	181
7	Industri Kecil	20
8	Industri Rumah Tangga	1503

Sumber: Buku Monografi Kecamatan Patikraja, 1999

Dilihat dari jenis kegiatan perekonomian, maka di kecamatan Patikraja cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri rumah tangga yang mencapai 1504 rumah tangga, dan terdapatnya 12 buah pasar semi permanen, yang berarti bahwa hampir di setiap desa di kecamatan Patikraja memiliki pasar.

4. Jumlah Penduduk Miskin

Walaupun banyak sarana perkeonomian yang ada di Kecamatan Patikraja, namun masalah kemiskinan ternyata masih tetap ada. Berdasarkan data yang tercatat pada kantor kecamatan Patikraja, jumlah penduduk miskin masih cukup banyak yaitu 6.507 KK atau 48,84 persen dari jumlah KK yang berjumlah 13.322 KK. Sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 2282 orang atau 5,004 persen dari Jumlah Penduduk. Data tersebut didasarkan atas kriteria yang ditetapkan melalui ketentuan BKKBN, yaitu data yang didasarkan atas kriteria Pra-KS; KS-1 dan Pengangguran. Untuk lebih Jelasnya perincian jumlah penduduk miskin yang ada di tiap-tiap desa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kecamatan Patikraja tiap-tiap Desa berdasarkan kriteria Pra-KS, KS-1 dan Pengangguran.

No	Desa	Pengangguran	Pra KS	KS-I	Jumlah
1.	Wlahar Kulon	56	233	27	316
2.	Wlahar Kidul	81	163	62	306
3.	Pegalongan	72	161	72	305
4.	Patikraja	164	227	90	481
5.	Notog	240	258	281	779
6.	Karangendep	182	503	57	742
7.	Sawangan	248	404	107	759
8.	Kedungwuluh Kidul	77	181	-	258
9.	Kedungwuluh Lor	292	360	96	748
10.	Kedungrandu	228	304	73	605
11.	Karanganyar	72	124	-	196
12.	Sidaboa	299	163	124	586
13.	Kedungwringin.	271	143	12	426
	Jumlah	2 282	3 224	1 001	6.507

Sumber: Laporan akhir PDM-DKE Kecamatan Patikraja, 1999

B. Gambaran Umum Implementasi Program PDM-DKE .

Evaluasi implementasi program PDM-DKE dalam penelitian ini lebih difokuskan pada program PDM-DKE tahun anggaran 1998/1999, yang merupakan tahun pertama penyaluran program JPS. PDM-DKE merupakan salah satu jenis program JPS dari beberapa program lainnya yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Dana yang diterima oleh masing-masing desa di Kecamatan Patikraja pada tahun anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Alokasi anggaran dana JPS PDM-DKE Kecamatan Patikraja tahun 1998/1999

No	Desa	Dana (Rp)		Jumlah
		Fisik	Ekonomi	
1.	Wlahar Kulon	1.692.585	13.116.000	14.808.585
2.	Wlahar Kidul	6.000.714	11.042.000	17.042.714
3.	Pegalongan	6.687.143	9.350.000	16.037.143
4.	Patikraja	4.997.000	25.369.958	30.366.589
5.	Notog	9.850.000	36.797.033	46.647.033
6.	Karangendep	8.660.564	31.210.000	39.870.564
7.	Sawangan	4.750.000	42.107.054	46.857.054
8.	Kedungwuluh Kidul	5.179.842	10.000.000	15.179.842
9.	Kedungwuluh Lor	21.957.800	28.872.753	50.830.553
10.	Kedungrandu	9.507.993	30.850.000	40.357.993
11.	Karanganyar	9.291.401	3.600.000	12.891.401
12.	Sidaboa	2.506.449	44.200.000	46.706.449
13.	Kedungwringin.	10.646.230	28.500.000	39.146.240
	Jumlah	416.742.150	101.727.721	315.014.429

Sumber: Laporan akhir PDM-DKE Kecamatan Patikraja tahun 1998/1999

Untuk mengetahui gambaran umum tentang implementasi program PDM-DKE di kecamatan Patikraja, akan dipaparkan tentang Organisasi Pelaksana program tersebut.

Secara Umum organisasi pelaksanaan penyaluran dana PDM-DKE ini menggunakan dua jalur, yaitu jalur Birokrasi dan jalur Fungsional. Pada tingkat Kecamatan Jalur birokrasi direpresentasikan dengan adanya Kordinator Pelaksana Lapangan (KPL) yang dijabat oleh Kepala Seksi pembangunan Desa tingkat Kecamatan. Sedangkan pada jalur fungsional direpresentasikan dengan adanya Fasilitator Kecamatan (FK), yang diambil dari pihak di luar pemerintahan, yang kordinasinya dibawah

konsultan manajemen. Tugas dari KPL karena mewakili tugas birokrasi adalah memberikan informasi dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. Sedangkan tugas Fasilitator Kecamatan adalah memfasilitasi kegiatan dan memberikan pembimbingan secara teknis kepada para Fasilitator Desa, dan bertanggung jawab secara operasional dan juga pelaporan kegiatan. Dengan demikian secara teknis operasional kegiatan bantuan terletak pada Fasilitator Kecamatan.

Kemudian pada tingkat desa, organisasi pelaksana juga diserahkan kepada dua jalur, yaitu TPKD (Tim Pelaksana dan Koordinator tingkat Desa) yang merupakan pihak yang terkait dengan Desa, dan Fasilitator Desa (FD). Oleh karena itu TPKD biasanya dijabat oleh Ketua LKMD, atau pengurus LKMD yang dianggap memiliki kompetensi. Sedangkan FD diambilkan dari penduduk setempat yang memiliki kompetensi untuk menggerakkan program. Tugas FD tidak lebih sebagai seorang manajer pada tingkat desa yang bertugas mulai dari pembuatan rencana sampai dengan pembuatan pelaporan.

Tugas dan fungsi masing-masing pihak, sangat erat dengan mekanisme pencairan dana Program. Untuk dapat mencairkan program, maka FD harus membuat proposal tentang kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan program recovery, yang mana dalam pembuatan program ini FD dibimbing dan dibina oleh FK. Proposal berisikan tentang potensi desa dan rencana kegiatan yang akan

dilakukan. Dalam pembuatannya FD harus bekerjasama dengan TPKD, karena untuk penentuan dan pemrioritasan program harus dimusyawarahkan dan didiskusikan dengan tingkat desa melalui musyawarah desa. Apabila skala program telah ditentukan, maka proposal, dimintakan pengesahan pihak FK dengan sebelumnya ditandatangani oleh pihak TPKD, yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan proyek di tingkat Kabupaten untuk mendapatkan pengesahan. Dana program dapat dicairkan apabila pihak pimpinan proyek tingkat kabupaten, telah setuju dan mengesahkan apa proposal yang dibuat oleh TPKD bersama FD. Penyaluran dana dilakukan melalui BRI.

C. Pengalokasian dana PDM-DKE.

Tujuan bagian ini adalah menganalisis tentang bagaimana sistem pengalokasian dana PDM-DKE di Kecamatan Patikraja, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan dengan kelompok sasaran program. Urgensitas pembahasan ini didasarkan pada asumsi tidak semua desa mengalokasikan dana sesuai dengan prosedur dan kelompok sasaran yang telah ditentukan. Sehingga tujuan program tidak dapat tercapai dengan baik.

Sasaran program PDM-DKE menurut buku pedoman pelaksanaan adalah untuk:

1. Menampung pencari kerja di berbagai sektor pembangunan baik di perkotaan maupun di pesedaan.
2. Mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil menengah

3. Meningkatkan daya beli masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan melalui peningkatan pendapatan.
4. Terpeliharanya sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat
5. Terpeliharanya kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, ada dua jenis sasaran, yaitu sasaran penerima program yaitu obyek/orang pelaku kegiatan dan sasaran kegiatan itu sendiri. Dilihat dari sisi penerima program maka program PDM-DKE hanya diperuntukan bagi penduduk yang miskin, dan pengangguran yang terkena dampak krisis ekonomi. Kemudian dilihat dari sasaran kegiatannya adalah segala jenis kegiatan yang memiliki implikasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian bentuk kegiatan ini dapat berupa kegiatan fisik, yaitu sarana pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan non fisik, yang berupa pemberian modal. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan di bahas mengenai Pengalokasian program melalui ke dua sasaran program.

1. Sasaran penerima Program

Karena banyaknya jumlah penduduk miskin dan keterbatasan dana yang ada, tidak semua penduduk miskin yang tercakup dalam kategori sasaran penerima program PDM-DKE menjadi sasaran utama. Di kecamatan Patikraja, jumlah penduduk yang berkategori miskin adalah 6.507 KK. Namun karena keterbatasan dana yang ada tidak semua

penduduk dengan kategori miskin mendapatkan kesempatan menjadi sasaran program tersebut pada tahap pertama. Untuk tahun anggaran 1998/1999 hanya ada 3285 jiwa atau 50,48 persen, yang terbagi atas dua sasaran kegiatan yaitu 1607 KK untuk kegiatan Fisik dan 1678 KK untuk kegiatan Ekonomi. Penetapan sasaran digunakan prioritas bagi penduduk miskin yang sangat rentan akibat krisis. Untuk proporsi masing-masing desa, jumlah sasaran penduduk miskin dari tiap-tiap desa tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah KK Miskin dan Sasaran Penerima Program PDM-DKE tahun 1998/1999

No	Desa	Jumlah KK Miskin	Jumlah sasaran		Jumlah sasaran	%
			Fisik	Ekono mi		
1.	Wlahar Kulon	316	20	61	81	25,63
2.	Wlahar Kidul	306	35	105	140	45,75
3.	Pegalongan	305	187	51	238	78,03
4.	Patikraja	481	50	94	144	29,93
5.	Notog	779	466	158	624	80,10
6.	Karangendep	742	50	382	432	58,22
7.	Sawangan	759	254	78	332	43,74
8.	Kedungwuluh Kidul	258	140	50	190	73,64
9.	Kedungwuluh Lor	748	107	140	247	33,02
10.	Kedungrandu	605	45	130	175	28,92
11.	Karanganyar	196	86	36	122	62,24
12.	Sidaboa	586	113	255	368	62,79
13.	Kedungwringin.	426	54	138	192	45,07
	Jumlah	6.507	1607	1678	3285	50,48

Sumber: Laporan Perkembangan PDM-DKE Kecamatan Patikraja 1999

Berdasarkan pada data di atas dapat dibaca bahwa dari sasaran penduduk miskin yang ada di kecamatan Patikraja, ternyata hanya 50,48 persen saja yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dana pada awal program. Lalu bagaimana dengan sisanya sebanyak 49,52 persen ?.

Program PDM-DKE adalah menggunakan model revolving atau dana bergulir, sehingga apabila program ini berhasil, maka pada kesempatan berikutnya untuk penduduk miskin yang belum mendapatkan dana pada awal program akan mendapatkan giliran pada periode berikutnya.

Untuk lebih jauh mengetahui tentang ketepatan sasaran, di bawah ini akan disajikan data hasil penelitian tentang ketepatan sasaran dilihat dari dua jenis sasaran kegiatan, yaitu sasaran penerima program untuk kegiatan Fisik, dan sasaran penerima program untuk kegiatan non fisik.

a. Sasaran Penerima Program Untuk Kegiatan Fisik.

Untuk dapat melibatkan penduduk miskin sebanyak mungkin, sistem pelaksanaan dari program ini menggunakan sistem padat karya. Dengan upah standar lokal, yang telah ditentukan secara bersama antara pihak pimpinan proyek kabupaten dengan pimpinan proyek di desa. Karena sifatnya padat karya, maka efisiensi pelaksanaan proyek bukanlah yang utama. Namun bukan berarti bahwa kualitas hasil.

Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa, di kecamatan patikraja, yaitu desa Notog, Kedungrandu dan Kedungwringin, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 9 Jumlah Keterlibatan kelompok sasaran dalam Kegiatan Fisik program PDM-DKE di tiga Desa.

Desa	Jenis Kegiatan	Lamanya program dikerjakan	Sasaran Program
Kedungwringin	Perbaikan 2 saluran Irigasi dan Pengersaan Jalan	285 OH	54
Kedungrandu	Perbaikan Jembatan	268 OH	45 OH
Notog	Perbaikan Saluran irigasi	466 OH	69 OH

Sumber: Laporan Kegiatan PDM-DKE di Desa Kedungwringin, Kedungrandau dan Notog tahun 1999

Dari ke tiga desa tersebut keterlibatan jumlah orang di desanya bervariasi. Demikian pula jumlah hari dalam pelaksanaan proyek juga berbeda. Desa Notog merupakan desa yang paling banyak melibatkan penduduk miskin dalam perbaikan irigasi, dengan jumlah 'orang-hari' juga lebih lama. Hal ini berbeda dengan desa Kedungrandu yang hanya melibatkan 45 orang, dengan lama waktu pengerjaan 268 orang hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi dan situasi desa sangat mempengaruhi terhadap tingkat keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan informasi dari para pelaksana proyek, khususnya para perangkat desa yang ikut menangani kegiatan tersebut, bahwa banyaknya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan proyek bersifat sukarela, walaupun sebenarnya juga dibayar. Namun demikian karena bayaran dari kegiatan kerja ini hanya Rp. 5.000, per hari untuk 8 jam kerja, maka hanya

orang-orang yang sangat membutuhkan uang saja yang kebetulan tidak memiliki pekerjaan untuk terlibat dalam kegiatan proyek PDM-DKE.

Namun demikian secara umum, kegiatan program PDM-DKE disambut gembira oleh sebagian besar warga pedesaan, yang secara ekonomi mereka memang sangat membutuhkan. Kesulitan yang terjadi pada saat program digulirkan dirasakan mereka sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa tersebut, kelompok sasaran penerima program sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh program, yaitu penduduk miskin, yang sangat rentan terkena dampak krisis ekonomi.

b. Sasaran Penerima program Untuk kegiatan Non Fisik (Kegiatan ekonomi)

Selain kegiatan fisik di atas, kegiatan non-fisik juga memiliki sasaran yang sama, yaitu penduduk miskin. Dalam operasionalnya, orang yang sudah masuk dalam sasaran program kegiatan pembangunan fisik tetap diperbolehkan untuk menjadi sasaran kegiatan non-fisik. Karena memang dalam aturan yang ada tidak ada pembatasan untuk itu. Oleh karena itu dapat saja satu orang menjadi sasaran dalam kegiatan fisik dan non fisik program PDM-DKE. Penentuan jumlah dan kriteria dari sasaran program diserahkan kepada masing-masing desa, dengan melihat situasi dan kondisi desa yang ada.

Berdasarkan laporan kegiatan yang dibuat pada awal tahun 1999 oleh masing-masing desa, khususnya tiga desa dapat diketahui jumlah sasaran program non fisik sebagai berikut

Tabel 10. Sasaran kegiatan program PDM-DKE Non-Fisik (ekonomi) di Desa Kedungwringin, Kedungrandu dan Notog, tahun 1998/1999

Desa	Jenis Kegiatan	Jumlah sasaran
Kedungwringin	Perdagangan, dan peternakan	132
Kedungrandu	Pertanian, Peternakan, perikanan dan perdagangan, industri	130
Notog	Perikanan, Spordi, Ternak Kambing dan perdagangan	158

Sumber: Laporan kegiatan PDM-DKE di tiga Desa, tahun 1999.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata apa yang dilaporkan dengan apa yang ada di lapangan ada beberapa perbedaan. Contoh kasus adalah di Desa Kedungwringin, dimana FD dan TPKD tidak secara konsisten menetapkan siapa yang menjadi sasaran program. Sehingga banyak diantara penduduk yang mampu menjadi sasaran program. Dengan kata lain, banyak diantara penduduk yang tidak masuk dalam kriteria miskin tetap menjadi sasaran. Apalagi di desa tersebut, dasar penentuan Kelompok Masyarakat (Pokmas)-nya menggunakan RW/RT. Sehingga pada tahap implementasi berikutnya diserahkan kepada masing-masing RW di desa tersebut.

Hal ini lain dengan yang terjadi di desa Kedungrandu, yang menggunakan model Pokmas berdasarkan pengelompokan bidang usaha. Namun sayangnya pengelompokan ini akhirnya tidak dapat dijalankan dengan baik, karena banyak anggota Pokmas yang tidak mampu juga

dimasukkan menjadi anggota. Dengan demikian yang terjadi adalah manipulasi atas kegiatan PDM-DKE di tingkat desa, khususnya yang terkait dengan sasaran.

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak konsistennya dalam penentuan kelompok masyarakat sebagai sasaran, *pertama*, belum ada kriteria yang jelas mengenai tentang kriteria miskin. Karena ternyata kriteria yang digunakan oleh BKKBN dengan kriteria Pra KS dan KS-I berbeda dengan kondisi empiris di lapangan. Akibatnya pihak desa dalam menentukan kriteria kemiskinan hanya didasarkan pada kesepakatan warga masyarakat.

Kedua, Banyak anggota kelompok masyarakat yang merasa iri apabila tidak dimasukkan menjadi pokmas. Alasan yang mereka berikan adalah bahwa mereka sama-sama terkena dampak krisis.

Ketiga, Tidak konsistennya para pengelola di tingkat pelaksana. Hal ini karena tidak sedikit para pengelola yang merasa tidak enak (jawa=rikuh) terhadap anggota masyarakat yang tidak menjadi penerima program. Akhirnya ditingkat masyarakat sasaran penerima program adalah dapat disamaratakan. Hal ini terjadi khususnya untuk kegiatan yang bersifat simpan pinjam maupun usaha perdagangan. Sedangkan yang peternakan lebih cenderung untuk konsisiten. Dengan demikian kemampuan sumber daya manusia di tingkat lapangan sangat menentukan.

2. Sasaran Kegiatan Program

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh informasi bahwa dana PDM-DKE dikecamatan Patikraja dialokasikan untuk dua macam kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan fisik dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat, dan kegiatan ekonomi produktif, dengan cara menyalurkan dana bagi kelompok masyarakat.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dipaparkan tentang pola penyaluran dana kedua jenis kegiatan tersebut.

1. Kegiatan Proyek Fisik.

Tidak ada ketentuan pasti yang mengatur besarnya alokasi dana PDM-DKE di tiap-tiap desa. Demikian pula mengenai bentuk kegiatannya. Semua kegiatan diserahkan kepada pihak desa, melalui FD dan TPKD untuk mengadakan musyawarah dengan masyarakat guna membicarakan tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan. Karena kebutuhan tiap-tiap desa berbeda, maka alokasi untuk dana kegiatan fisik pun bervariasi. Untuk lebih lengkapnya data mengenai alokasi kegiatan fisik di kecamatan Patikraja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 11. Proporsi alokasi dana PDM-DKE untuk kegiatan Fisik di ke tiga Desa tahun 1998/1999

No	Desa	Jumlah Dana	Fisik	%
1.	Wlahar Kulon	14.808.585	1.692.585	11.43
2.	Wlahar Kidul	17.042.714	6.000.714	35.21
3.	Pegalongan	16.037.143	6.687.143	41.70
4.	Patikraja	30.366.589	4.997.000	16.46
5.	Notog	46.647.033	9.850.000	21.12
6.	Karangendep	39.870.564	8.660.564	21.72
7.	Sawangan	46.857.054	4.750.000	10.14
8.	Kedungwuluh Kidul	15.179.842	5.179.842	34.12
9.	Kedungwuluh Lor	50.830.553	21.957.800	43.20
10.	Kedungrandu	40.357.993	9.507.993	23.56
11.	Karanganyar	12.891.401	9.291.401	72.07
12.	Sidaboa	46.706.449	2.506.449	5.37
13.	Kedungwringin.	39.146.240	10.646.230	27.20

Sumber: Data dokumentasi diolah,

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi dana untuk kegiatan fisik masing-masing desa sangat berbeda. Ada yang lebih mementingkan untuk kegiatan fisik, dan ada desa yang lebih mementingkan untuk kegiatan ekonomi. Penentuan proporsi tersebut menunjukkan bahwa jenis kebutuhan untuk masing-masing desa juga berbeda.

Proses penentuan prioritas kegiatan untuk masing-masing desa biasanya dilakukan melalui rapat dan musyawarah desa. Sehingga apa yang akan dilakukan di desa paling tidak telah menjadi kesepakatan masyarakat desa yang bersangkutan. Dari prioritas yang telah

ditentukan, bentuk kegiatan fisik dari ke 13 desa di kecamatan Patikraja dapat dikatakan bahwa sebagian besar dana kegiatan fisik digunakan untuk perbaikan jalan desa khususnya berupa pengerasan jalan desa, perbaikan saluran irigasi, dan sarana umum (lihat tabel 12). Penentuan prioritas ini berdasarkan informasi yang diterima, karena jalan-jalan yang menjadi objek dari program tersebut, sudah kurang layak untuk dilalui, dan jalan tersebut merupakan jalan yang cukup vital bagi kegiatan mobil masyarakat.

Demikian pula dengan pemilihan saluran irigasi sebagai prioritas pembangunan di beberapa desa, karena dirasakan bahwa kegiatan tersebut sangat vital bagi kelangsungan kehidupan para petani. Hal ini dilakukan karena pihak desa merasa bahwa selama krisis ekonomi kurang adanya perhatian lagi atas masalah-masalah yang berkait dengan kebutuhan prasarana umum

Tabel 12. Jenis kegiatan proyek Fisik Dana Program PDM-DKE tahun 1998-1999

No	Desa	Jenis Kegiatan
1.	Wlahar Kulon	Perbaikan tanggul irigasi
2.	Wlahar Kidul	Pembuatan Sumur Pantek : 1 buah
3.	Pegalongan	Pengerasan Jalan (230m) dan Tembok sumur, Rehab WC, SD dan pembuatan Gardu
4.	Patikraja	Perbaikan saluran air hujan 0.6x0.6x29.5 m
5.	Notog	Perbaikan saluran irigasi : 460 m
6.	Karangendep	Pembuatan Bendungan (50 m ³) dan saluran irigasi cacingan (20 M ³)
7.	Sawangan	Rehab Jembatan : 4x3x2,5m dan Rehab Jalan 3 x 500 m
8.	Kedungwuluh Kidul	Pengaspalan jalan 3x150 m
9.	Kedungwuluh Lor	Pembuatan tebing pembuangan air dan tanggul saluran air
10.	Kedungrandu	Perbaikan jembatan 8 x 1m dan 12 x 3 m
11.	Karanganyar	Perbaikan saluran irigasi 150 m
12.	Sidaboa	Pengerasan jalan : 125 x 2,5 m ² Pengaspalan jalan 50 x 2,5 m ²
13.	Kedungwringin	Perbaikan saluran irigasi: 124,5 m ² Pengaspalan jalan 170,5 x 2,5 m ²

Sumber: Data dokumentasi diolah.

Berdasarkan pada data di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara prinsip alokasi dana untuk kegiatan fisik sesuai dengan yang dikehendaki oleh program, yaitu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat.

2. Program PDM-DKE Non fisik.

Selain kegiatan fisik, maka program PDM-DKE diarahkan pula untuk kegiatan non-fisik, yang lebih di arahkan untuk kegiatan pergerakan ekonomi produktif. Jenis kegiatan non-fisik ini juga bermacam-macam, mulai dari peternakan, jasa maupun pertanian, perbengkelan. Demikian pula prosentase jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan Non-fisik juga bervariasi. Di bawah ini akan disajikan tabel tentang alokasi dana kegiatan non-fisik di kecamatan Patikraja tahun 1998/1999.

Tabel 13 : Alokasi dana PDM-DKE tahun 1998/1999 untuk kegiatan non-fisik.

No	Desa	Jumlah Dana	Alokasi Non-Fisik	%
1.	Wlahar Kulon	14.808.585	13.116.000	88,57
2.	Wlahar Kidul	17.042.714	11.042.000	64,79
3.	Pegalongan	16.037.143	9.350.000	58,30
4.	Patikraja	30.366.589	25.369.958	83,55
5.	Notog	46.647.033	36.797.033	78,88
6.	Karangendep	39.870.564	31.210.000	76,28
7.	Sawangan	46.857.054	42.107.054	89,86
8.	Kedungwuluh Kidul	15.179.842	10.000.000	65,88
9.	Kedungwuluh Lor	50.830.553	28.872.753	56,80
10.	Kedungrandu	40.357.993	30.850.000	76,44
11.	Karanganyar	12.891.401	3.600.000	27,93
12.	Sidaboa	46.706.449	44.200.000	94,63
13.	Kedungwringin.	39.146.240	28.500.000	72,80

Sumber: Data dokumentasi diolah,

Dari dana yang tersaji dalam tabel di atas, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, seperti pemberian modal para pedagang, simpan pinjam, Modal kerja usaha jasa, modal kerja pekerjaan

pertanian, dan Peternakan. Pemilihan jenis usaha tersebut juga diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tanpa ada intervensi dari pihak pemerintah desa. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan di masing-masing desa tersaji dalam tabel 14:

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat di baca bahwa kegiatan yang selalu ada dalam program ini adalah peternakan, dan modal perdagangan, disusul kemudian modal untuk industri jasa, simpan pinjam dan pertanian. Peternakan menjadi promadona karena wilayah kecamatan patikraja menurut beberapa informan, berpotensi untuk pengembangan peternakan khususnya ternak kambing. Hal ini karena bahan makanan kambing yang berupa rumput cukup tersedia di wilayah kecamatan Patikraja. Disamping itu kegiatan peternakan kambing hanya merupakan kegiatan sampingan, sehingga tidak harus secara khusus menyediakan waktu untuk kegiatan tersebut.

Disamping peternakan, permodalan usaha dagang, khususnya perdagangan dengan skala kecil seperti warung, perdagangan keliling merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh sebagian penduduk di wilayah kecamatan Petikraja. Oleh karena itu hampir di setiap desa kegiatan pemberian modal bagi usaha dagang ini cukup dominan.

Tabel 14. Jenis kegiatan proyek Non-Fisik (Ekonomi) Dana Program PDM-DKE tahun 1998-1999

No	Desa	Jenis Kegiatan
1.	Wlahar Kulon	Pertanian, Industri Rumah tangga Pedagang bakso, soto dan warungan
2.	Wlahar Kidul	Pertanian, Perdagangan, dan Industri rumah tangga
3.	Pegalongan	Ternak Unggas, Perdagangan, Bengkel sepeda motor, dan permodalan usaha
4.	Patikraja	Pertanian, Kerajinan, jasa Pengusaha kecil dan konstruksi
5.	Notog	Perikanan, sapirodi, Ternak kambing Perdagangan, bengkel dan konveksi
6.	Karangendep	Perikanan dan Peternakan Pertanian dan perdagangan
7.	Sawangan	Industri, Perdagangan, peternakan, perikanan dan pertanian
8.	Kedungwuluh Kidul	Pertanian, perdangan, Industri dan jasa
9.	Kedungwuluh Lor	Pertanian dan perdaganagn Peternaklan, Periknan dan Industri
10.	Kedungrandu	Pertanian, Peternakan, dan perikanan Industri, Perdagangan dan jasa
11.	Karanganyar	Modal usaha dagang
12.	Sidaboa	Pertanian, peternakan dan periknan Industri, dagang dan jasa
13.	Kedungwringin.	Perdagangan dan Peternakan, simpan pinjam

Sumber: Data dokumentasi diolah. 1999

Disamping kegiatan usaha di atas, kegiatan simpan pinjam dengan modal dari dana PDM-DKE, ternyata juga merupakan primadona. Hampir di setiap desa selalu ada kegiatan simpan pinjam yang berasal dari dana ini. Beberapa responden mengatakan bahwa '*kegiatan simpan pinjam merupakan kegiatan yang sangat mudah dilakukan. Disamping itu penggunaan dana dari hasil simpan pinjam ini lebih bebas, tidak terbatas pada kegiatan yang telah ditentukan oleh program*'.

Berdasarkan pada keterangan di atas maka dapat disimpulkan sementara bahwa, kegiatan Non-fisik program PDM-DKE memiliki cakupan kegiatan yang sangat luas. Hal ini sesuai dengan makna dari kegiatan ekonomi sendiri yang tidak terbatas hanya jual-menjual saja, melainkan semua aktivitas yang dapat mendatangkan hasil dan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan penyaluran dana non fisik (ekonomi produktif), di kecamatan Patikraja, ada dua macam pola penyaluran, sekaligus sistem pengelolaannya. *Pertama*, penyaluran dengan menggunakan pola yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan ini. Dalam juklak tersebut dikehendaki agar penyaluran dana dilakukan melalui kelompok-masyarakat (POKMAS), yang secara spesifik memiliki usaha ekonomi produktif. Pokmas ini dibentuk sebelum dana PDM-DKE disalurkan. Pengelompokan pokmas didasarkan atas kegiatan usaha yang sejenis, yang merupakan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif. Jenis kegiatan tersebut misalnya, kelompok petani peternak (ayam, kambing, sapi, dll) kelompok usaha dagang (pedagang keliling, pedagang tetap, dll), kelompok usaha pelayanan jasa (misalnya menjahit, sablon, dll).

Yang berhak menjadi anggota Pokmas adalah anggota masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi secara langsung dan dikhawatirkan mengalami kemandegan usaha sehingga tidak dapat melangsungkan kegiatan ekonominya. Yang termasuk kelompok ini adalah orang-orang

yang tergolong Miskin, dan yang terkena PHK akibat krisis tersebut.). Dengan demikian apabila organisasi Pokmas ini dapat berjalan secara efektif, maka dana PDM-DKE dapat mencapai sasaran yang tepat, karena anggota Pokmas adalah secara spesifik merupakan kumpulan orang-orang yang memerlukan bantuan dari program ini.

Apa yang terjadi di Kecamatan Patikraja, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua desa menggunakan pola yang pertama, dimana penyaluran dana melalui pokmas. Beberapa desa yang penggunaannya melalui pembentukan pokmas ini antara lain tersaji dalam tabel 15.

Namun setelah dianalisis, ada beberapa kelemahan dari pola pertama ini. *Pertama*, pembentukan pokmas yang sifatnya instan, yaitu hanya sekedar mengelompokkan berdasarkan kegiatan usaha, cukup rentan untuk keberlangsungannya, apalagi apabila tidak didukung dengan sistem pengelolaan dan kepengurusan yang solid dari kelompok tersebut. Ketidakuatan keikatan antara anggota Pokmas diasumsikan menjadi pemicu kurang kuatnya kelompok ini.

Tabel 15. Jenis dan Jumlah Pokmas di tiap-tiap desa di kecamatan Patikraja

No	Desa	Jumlah Pokmas	Jenis Pokmas
1.	Wlahar Kulon	4	Pokmas Peternakan, Perdagangan, Pertanian, dan simpan Pinjam
2.	Wlahar Kidul	3	Perdagangan, Simpan Pinjam, dan Pertanian
3.	Pegalongan	2	Simpan pinjam, dan Permodalan, Peternakan
4.	Patikraja	4	Simpan Pinjam dan Perikanan, Peternakan, dan Perdagangan
5.	Notog	5	Simpan Pinjam, Peternakan, Perdagagan
6.	Karangendep	5	Simpan Pinjam dan Peternakan
7.	Sawangan	3	Simpan Pinjam dan Peternakan dan Perdagangan
8.	Kedungwuluh Kidul	5	Simpan Pinjam, Perdagagn dan Peternakan
9.	Kedungwuluh Lor	5	Pertanian. Simpan pinjam, perdagangan
10.	Kedungrandu	4	Pertanian, Simpan Pinjam, an Peternakan dan Perdagangan
11.	Karanganyar	5	Simpan Pinjam dan Peternakan
12.	Sidaboa	6	Simpan Pinjam, Peternakan dan Perdagangan
13.	Kedungwringin.	8	Peternakan, Simpan Pinjam dan Perdagangan

Sumber: Data dokumentasi diolah. 1999

Beberapa kasus dijumpai bahwa aktivitas kelompok masyarakat ini hanya berlangsung selama program bergulir, yaitu selama kegiatan pemantauan masih aktif dilakukan, khususnya oleh FD. Dalam kegiatan proyek FD hanya dibayar untuk selama 6 bulan. Kemudian setelah habis waktu kontrak, maka FD tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap kegiatan pengguliran dan pemantauan program. Tanggung jawab

kemudian dialihkan kepada TPKD, yang disebagian besar Desa dijabat oleh Ketua LKMD.

Namun berdasarkan Pemantauan terhadap kegiatan TPKD, khususnya setelah jangka waktu 6 bulan pertama, maka banyak masyarakat desa yang kurang peduli lagi terhadap keberlangsungan program. Akibatnya di sebagian besar desa di Kecamatan Patikraja, beberapa kegiatan ekonomi produktif terjadi kemacetan.

Kedua, walaupun pemilihan jenis kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat, namun terlihat kesan bahwa jenis kegiatan yang ada dimasyarakat terlihat 'mumpang'. Masyarakat memanfaatkan dana ini karena merasa ada 'rejeku nomplok', yang harus segera diambil. Sehingga banyak terjadi masyarakat dimana kegiatan yang dilakukan hanya berlangsung sebentar. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan yang berlangsung selama ini, bahwa sebagian besar kegiatan baik pertanian, perdagangan maupun peternakan, banyak beralih kegiatan menjadi kegiatan simpan pinjam. Alasan yang diberikan adalah bahwa kegiatan simpan pinjam lebih fleksibel dibandingkan dengan kegiatan- lainnya. Hal ini berlangsung ketika pemantauan dari pihak FD dan TPKD sudah tidak efektif lagi.

Ketiga, Kondisi ini dibarengi dengan tidak adanya ketegasan dari program tentang sistem pertanggung jawaban keuangan yang jelas, dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas bagi anggota pokmas yang tidak

mantaati aturan main. Aturan main dan sistem pengguliran diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan pengelola.

Keempat, Ketidak berlagsungan program diakibatkan karena tidak ada tanggung jawab yang jelas kepada siapa program ini diserahkan. Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan program hanya dikelola oleh FD bersama dengan TPKD (yang dalam hal ini dipegang oleh ketua LKMD), namun pihak desa tidak secara aktif dilibatkan. Padahal FD dan TPKD hanya dibayar selam 6 bulan. Oleh karena itu setelah 6 bulan berlangsung pihak pemerintah desa juga tidak banyak mau tahu tentang program ini. Alasan yang diberikan oleh sebagian besar aparat pemerintah desa adalah tidak adanya dana untuk kegiatan ini, apalagi untuk kegiatan administrasi. Kondisi yang demikian menyebabkna kurangnya pembinaan yang kontinyu dari pihak aparat yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana, sehingga pokmas yang ada kurang bermanfaat.

Kelima, kontrol masyarakat kurang efektif, karena jarang ada kegiatan rutin untuk membahas perkembangan dana. Keanggotaan Pokmas yang bersifat lintas RW dan RT akan lebih sulit untuk mengontrol kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian atas beberapa desa, pokmas bentukan dari model PDM-DKE sudah tidak efektif lagi dalam usaha pembinaan kelompok, apalagi dana yang sudah beralih fungsi menjadi simpan pinjam.

Namun demikian bukan berarti bahwa pola ini tidak ada keuntungannya. Salah satu keuntungan tersebut adalah program dapat mencapai sasaran dengan tepat. Pengelompokan jenis usaha mempermudah program mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pada kelompok sasaran yang tepat serta usaha yang tepat pula.

Sedangkan *pola kedua*, adalah penyaluran dana yang tidak menggunakan POKMAS seperti yang dikehendaki oleh program. Penyaluran dana dilakukan melalui institusi atau lembaga masyarakat yang telah ada. Misalnya dibagi melalui institusi RW dan RT. Dalam pola ini Institusi RW/RT dianggap sebagai Pokmas yang dapat mengelola dana PDM-DKE.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang ada di desa Kedungwringin diperoleh informasi bahwa, pemilihan institusi RW sebagai Pokmas, karena pemerintah desa khawatir akan keberlangsungan dari program. Institusi RT dan RW nantinya akan berfungsi menjadi pengendali dalam kegiatan.

Berdasarkan pengamatan dan informasi dari para ketua RW di Kedungwringin diperoleh informasi bahwa, Dana PDM-DKE sampai saat ini justru telah berkembang dengan baik. Rw sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah desa justru lebih efektif dalam mengendalikan dana tersebut, karena keberadaan institusi ini lebih langgeng dibandingkan dengan model pembentukan Pokmas yang sifatnya sementara.

Ada beberapa keuntungan dari pola penyaluran yang ke dua ini, antara lain *Pertama*, Keberlangsungan program dapat dijamin, karena institusi RW lebih langgeng. Dengan demikian dana PDM-DKE yang merupakan dana masyarakat akan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Kedua, Kontrol masyarakat terhadap keberadaan dana PDM-DKE lebih efektif, hal ini karena institusi RW/RT sebagai pengelola setiap bulan mengadakan rapat rutin, sekaligus untuk membahas perkembangan dana yang ada di masyarakat. Sehingga apabila ada anggota kelompok masyarakat yang macet dalam usaha pengembalian dana bergulir, maka biasanya dibahas secara intensif dalam rapat RT maupun RW.

Ketiga, laporan kegiatan dan administrasi akan mudah dilakukan karena pihak yang bertanggung jawab juga jelas. Pemegangan kas biasanya dilakukan oleh bendahara RT maupun RW, sehingga akan memudahkan dalam proses pembuatan laporan.

Namun demikian bukan berarti pola ini tidak mengandung kelemahan. Satu kelemahan pada model ini adalah tidak disiplinnya kelompok sasaran dalam menggulirkan dana kepada kelompok sasaran yang tepat. Karena pokmas adalah institusi RT dan RW maka semua anggota RT dan RW berhak untuk menjadi anggota Pokmas. Dengan kata lain penduduk miskin memiliki kurang akses terhadap penggunaan dana PDM-DKE dibandingkan apabila menggunakan pola penyaluran sistem Pokmas.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari efektifitas kelompok sasaran yang dicapai maka pola pertama lebih tepat, namun dilihat dari keberlangsungan program pola kedua lebih baik. Demikian pula dilihat dari segi pertanggung jawaban administrasi pola pertama akan sulit dibandingkan dengan pola yang kedua.

D. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana PDM-DKE

Bagian ini menganalisis tentang pemanfaatan dana PDM-DKE oleh kelompok masyarakat sasaran, khususnya untuk dana yang non-fisik (ekonomi). Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa program PDM-DKE, khususnya kegiatan ekonomi diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif. Untuk menganalisis bagian ini akan dipaparkan hasil survey di tiga desa yaitu desa Kedungwringin, desa Kedungrandu dan desa Notog kaitannya dengan pemanfaatan dana PDM-DKE tersebut.

Untuk keperluan analisis bagian ini dibagi menjadi dua sub bahasan antara lain: Sistem Pengelolaan dana dan Model pemanfaatan modal atau pinjaman yang diberikan;

1. Sistem pengelolaan Program

Dalam sistem pengguliran dana PDM-DKE, tidak ada sistem yang baku bagaimana seharusnya sistem pengelolaan dana dilakukan. Namun pengelolaan tersebut diserahkan kepada masyarakat yang tergabung

dalam Pokmas. Sehingga pada tingkat masyarakat institusi pokmas merupakan institusi yang diberi hak penuh dalam pengelolaan keuangan.

Di ke tiga desa lokasi penelitian, sistem pengelolaan keuangan ternyata memiliki kemiripan, dimana ketua pokmas, dengan dibantu bendahara pokmas mengelola keuangan sekaligus mencatat pendataan tentang peredaran modal yang ada di masyarakat. Hanya sayangnya untuk beberapa desa sistem ini tidak berlangsung lama, yaitu hanya berlangsung rata-rata 6-9 bulan setelah program digulirkan, seiring dengan berhentinya tugas FD dan TPKD dalam pengelolaan program. Sedangkan setelah itu kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan sudah kurang terkontrol dengan baik, apalagi seiring dengan terjadinya kemacetan dalam pengembalian modal/simpan pinjam yang dikelolanya.

Di kedua desa yaitu desa Kedungrandu dan desa Notog, sebagian pokmas sudah tidak aktif seperti pada awal program. Kegiatan Pengguliran sudah kurang terkontrol dengan baik. Hal ini disebabkan karena model pengguliran di ke dua desa menggunakan sistem pengelompokan jenis kegiatan dengan keanggotaannya melintasi wilayah RT dan RW. Sehingga pengurus Pokmas merasa kesulitan untuk dapat mengendalikan anggota. Akibatnya sangat sulit untuk mendata tentang perkembangan jumlah dana yang bergulir, apalagi sebagian dari modal yang digulirkan terjadi kemacetan, termasuk dana yang digunakan untuk kegiatan peternakan kambing. Demikian pula ketua Pokmas sebagai orang yang diberi tanggung jawab banyak yang tidak mengetahui

secara persis berapa perkembangan dana yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena mekanisme pengontrolan program berupa rapat rutin dengan anggota, maupun pengurus jarang dilakukan

Kondisi ini berbeda dengan yang ada di Desa Kedungwringin, dimana institusi pokmas adalah RT dan RW, sehingga pengelolaan mudah terkontrol, karena anggota RT dan RW berhak untuk menanyakan perkembangan dana yang ada di Pokmas tersebut. Hal ini terbukti pada saat penelitian dilakukan, semua data tentang kegiatan penggalangan masih lengkap. Sehingga data tentang perkembangan dana dan kegiatan dapat tercatat dengan baik.

Beberapa hal tentang ketentuan yang berlaku secara umum dalam sistem penggalangan dana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Sistem Simpan Pinjam.*

Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan di ke tiga desa memiliki kemiripan. Kegiatan simpan pinjam ini meliputi kegiatan peminjaman modal usaha, maupun simpan pinjam itu sendiri. Ketua Pokmas dengan dibantu bendahara yang mengelola keuangan. Untuk keberlangsungan program, sistem jasa yang dikenakan pada setiap peminjam bervariasi tergantung kesepakatan anggota Pokmas. Di desa Notog dan Kedungrandu, secara umum jasa peminjaman berkisar antara 0,5 persen s/d 1,5 persen per bulan. Sedangkan di desa Kedungwringin ada yang menerapkan jasa lebih besar hingga mencapai 2 persen per bulan.

Jangka waktu peminjaman, pada awal program digulirkan ditetapkan secara bersama yaitu 6 bulan. Namun setelah 6 bulan pertama berakhir banyak pokmas yang merubah pola jangka waktu peminjaman, sehingga saat ini ada peminjaman dengan jangka waktu 3 bulan, dan ada jangka waktu 10 bulan. Hal ini karena ketentuan mengenai jangka waktu peminjaman diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat anggota pokmas.

Untuk melihat gambaran bagaimana tingkat perkembangan dana simpan pinjam (termasuk di dalamnya untuk usaha penambahan modal), dibawah ini akan disajikan perkembangan dana di ketiga desa.

Tabel 16. Perkembangan dana PDM DKE kegiatan simpan pinjam dan penambahan modal usaha per agustus 2000 (selama 18 bulan)

No	Desa	Awal (Rp)	Jasa	Sekarang	Kenaikan
1	Kedungwringin	22.500.000	4.837700	27.377.700	21,5
2	Kedungrandu	27.500.000	-	17.875.000	-
3	Notog.	32.500.000	-	20,345.000	-

Sumber: Hasil survey di Pokmas. Laporan ini didasarkan pada laporan yang masuk secara resmi ke Pokmas

Data di atas memperlihatkan bahwa tidak semua desa dapat mengelola dengan baik uang yang ada di masyarakat. Hal ini seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa, model penyaluran dana melalui Pokmas yang pembentukannya secara instan, kurang dapat menjamin keberlangsungan program. Dan hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di desa Kedungwringin.

Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi adalah, antara lain:

- 1). Banyak anggota pokmas yang sengaja tidak mengembalikan/mengangsur pinjaman. Sebagian anggota pokmas ini beranggapan uang PDM-DKE merupakan uang negara yang menjadi hak rakyat. Sehingga sepatasnya untuk digunakan secara cuma-cuma.
- 2). Sistem pengelolaan yang kurang jelas. Ini diakibatkan karena pengelola pokmas tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dibandingkan dengan beban kerjanya. Sehingga banyak pengurus pokmas yang kurang aktif dan serius dalam mengelola program. Kerja mereka hanya didasarkan atas suka rela dan pengabdian. Oleh karenanya mereka jarang mengurus dengan serius masalah tersebut.
- 3). Tidak adanya tuntutan pertanggungjawaban yang jelas dari organisasi yang lebih tinggi, baik desa, maupun pemberi dana. Sehingga para pengelola seolah bebas untuk mengelola keuangannya. Pertanggung jawaban hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka wajar apabila dalam sistem pengguliran dana PDM-DKE di beberapa desa kurang dapat dijaga keberlangsungannya.

b. *Sistem Penggaduhan ternak*

Hewan ternak yang secara umum digaduhkan adalah kambing, Hal ini dianggap karena kambing merupakan hewan yang mudah untuk dipelihara khususnya dilihat dari segi pakan dan perkandangan.

Dalam bidang peternakan, sistem yang dipakai adalah revolving atau penggaduhan bergilir. Maksudnya adalah bagi peternak yang mendapatkan kesempatan pertama menggaduh kambing, harus menyerahkan satu anak kambing betina kepada kelompok masyarakat lain apabila kambing yang dipeliharanya sudah beranak. Sedangkan kambing induknya tetap menjadi milik orang yang pertama mendapatkan kambing tersebut. Pada giliran berikutnya, petani yang mendapatkana anak kambing betina juga harus menyerahkan kepada sasaran lain apabila kambing yang dipeliharanya sudah beranak. Dan seterusnya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan jumlah peternakan kambing dibawah ini akan disajikan data terakhir tentang jumlah kambing yang ada di Masyarakat.

Tabel 17. Data perkembangan jumlah kabing di Desa Notog, Kedungrandu dan Kedungwringin, Per Agustus 2000 (selama 18 bulan)

No	Desa	Awal	Mati	Dijual	lahir	Pena mbah an	Kenai kan
1	Kedungwringin	31	5	2	30	25	80,65
2	Kedungrandu	25	6	4	14	8	32,00
3	Notog.	21	7	4	16	9	42,86

Sumber: Hasil survey di Pokmas. Laporan ini didasarkan pada laporan yang masuk secara resmi ke Pokmas

Berdasarkan pada ata di atas, terlihat bahwa pengguliran dana dengan model penggaduhan ternyata dapat memperoleh tingkat kenaikan yang cukup baik, walaupun antara desa yang satu dengan desa yang lainnya sangat mencolok perbedaannya. Hal ini seperti yang terjadi antara desa Kedungwringin dengan desa Notog.

Perbedaan tingkat kenaikan tersebut berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yang antara lain disebabkan oleh beberapa hal:

- 1). Ada beberapa petani peternak penggaduh yang memang secara sengaja melaporkan bahwa kambing yang dipeliharanya meninggal, padahal menurut beberapa informasi kambing tersebut telah di jual.
- 2). Ada beberapa petani peternak yang berhenti di tengah jalan, sehingga terpaksa kambingnya dijual. Kondisi ini terjadi karena ada beberapa peternak yang memang sebelumnya belum pernah memelihara kambing, sehingga merasa tidak mampu memelihara dengan baik.

Berdasarkan pada informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara sistem pengelolaan kegiatan simpan pinjam dengan penggaduhan ternak memiliki permasalahan yang hampir sama. Kejelasan pertanggung jawaban program menjadi penting mengingat apapun bentuk kegiatannya apabila tidak jelas pengorganisasiannya, maka sulit untuk mencapai keberhasilan, apalagi dalam bentuk

keberlanjutan program. Kebiasaan masyarakat untuk selalu dituntun dalam setiap kegiatan menjadi dilema ketika ada tuntutan agar masyarakat diberdayakan dan dimandirikan.

Untuk mendukung tentang informasi tersebut di atas, di bawah ini akan disajikan distribusi frekwensi tentang pengetahuan masyarakat sasaran yang sistem pengelolaan keuangan di Pokmas

Tabel 18. Distribusi frekwensi jawaban responden atas pengetahuan anggota pokmas dalam pengelolaan dana JPS PDM-DKE

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tida	%
1	Apakah sdr tahu siapa yang mengelola program PDM-DKE	94	89,52	11	10,48
2	Apakah Sdr setuju PDM-DKE dikelola seperti sekarang ini.	83	79,05	22	20,95
3	Apakah Sdr. tahu perkembangan dana PDM-DKE	57	54,29	48	45,71
4	Apakah ada kegiatan rapat rutin untuk membahas perkembangan dana PDM-DKE	28	26,67	77	73,33

Sumber: data Primer diolah

Berdasarkan pada data di atas terlihat bahwa dari empat pertanyaan yang disampaikan kepada anggota Pokmas, ternyata memiliki jawaban sangat bervariasi. Namun demikian secara umum para anggota Pokmas mengetahui siapa pengelola dana PDM-DKE. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pengurus sudah dikenal oleh anggotanya. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan tentang sistem pengelolaan dana PDM-DKE, sebagian besar anggota pokmas masih tetap setuju, dengan prosentase sebesar 79,52 persen. Ini membuktikan bahwa mereka masih suka dengan pola yang berlaku

seperti sekarang ini. Menurut beberapa responden alasan yang dikemukakan adalah bahwa, 'model penyaluran dana JPS lewat masyarakat merupakan yang didambakan, karena masyarakat diberi keleluasaan penuh dalam pengelolaan dana'.

Namun demikian walaupun masyarakat khususnya anggota pokmas setuju dengan sistem pengelolaan dana yang ada, diantara mereka hanya 54,29 persen saja yang tahu tentang perkembangan dana PDM-DKE. Sedangkan selebihnya tidak tahu. Ada beberapa hal yang memungkinkan para anggota pokmas tidak tahu perkembangan dana, antara lain:

- 1). Karena kenyataannya masyarakat memang tidak mau tahu tentang dana JSP tersebut; apalagi bagi mereka yang sudah pertama kali mendapatkan dana pinjaman; atau
- 2). Masyarakat tidak berani untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya kurang jelas kepada pengurus; atau
- 3). Masyarakat memang sebenarnya juga tidak tahu, dikarenakan tingkat pengetahuan tentang program yang sangat minim. Mereka sudah cukup senang dengan kondisi yang ada sekarang ini.

Dengan demikian beberapa alternatif kemungkinan jawaban tersebut merupakan fenomena masyarakat desa saat ini. Ketidaktahuan masyarakat tentang perkembangan dana, barangkali karena memang tidak ada pertemuan yang secara rutin diadakan untuk membicarakan secara khusus masalah Dana JPS PDM-DKE. Hal ini

dibuktikan dengan hasil survey, dimana hanya 26,7 persen yang menganggap bahwa ada kegiatan rapat rutin tentang dana PDM-DKE. Kecilnya prosentase jawaban atas pertanyaan no. 4 di atas ini menunjukkan bahwa hanya sedikit pokmas yang secara rutin melakukan rapat untuk membicarakan perkembangan dana.

Dengan melihat data di atas dapat diasumsikan bahwa model pengujian dana PDM-DKE dirasa belum begitu efektif berjalan di masyarakat.

2. Pemanfaatan program

Dalam bagian ini akan di bahas tentang sejauhmana pemanfaatan program oleh Pokmas untuk menjawab pertanyaan : *Apakah dana PDM-DKE dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sesuai dan dikehendaki oleh program ?*. Untuk mengetahui lebih jauh, di bawah ini akan disajikan beberapa distribusi frekwensi yang berkaitan dengan pemanfaatan dana PDM-DKE tersebut.

Tabel 19. Distribusi frekwensi rata-rata besarnya pinjaman pokmas

	Besarnya pinjaman modal	Frek	%
A	Kurang dari 200. 000	17	21,79
b	200,000 s.d 300.000	36	46,15
c	Lebih dari 300.000	25	32,05
	Jumlah	78	100,00

Sumber : Data Primer diolah, ...

Dari tabel di atas terlihat bahwa, besarnya pinjaman sangat bervariasi. Namun yang paling banyak besarnya pinjaman adalah antara

Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Besarnya pinjaman anggota tidak ada ketentuan yang pasti dan diserahkan sepenuhnya kepada anggota pokmas. Penentuan besarnya pinjaman untuk masing-masing anggota pokmas biasanya adalah jumlah anggota pokmas. Semakin banyak anggota pokmas, maka semakin sedikit jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh anggota, karena besarnya pinjaman yang diberikan dihitung berdasarkan jumlah dana yang diterima oleh Pokmas di bagi dengan jumlah anggota pokmas. Besarnya pinjaman di atas didasarkan atas pinjaman yang dilakukan pertama kali dan juga rata-rata peminjaman berikutnya.

Tabel berikutnya akan menyajikan tentang kecenderungan pemanfaatan dana pinjaman oleh anggota pokmas

Tabel 20. Distribusi frekwensi rata-rata Pemanfaatan dana pinjaman oleh pokmas.

	Pemanfaatan dana	Frek	%
a	Modal usaha /dagang	21	26,92
b	Kebutuhan konsumsi	40	51,28
c	Kebutuhan lain yang mendesak	17	21,79
	Jumlah	78	100,00

Sumber : Data Primer diolah,

Dari data di atas menunjukkan bahwa tidak semua pinjaman terhadap dana PDM-DKE digunakan sepenuhnya untuk kegiatan Modal usaha atau perdagangan. Justru dari data yang ada hanya 26,92 persen saja yang memanfaatkan dana JPS tersebut untuk modal usaha. Yang paling besar prosentennya adalah untuk kebutuhan konsumsi, sebesar

51,28 persen. Sedangkan sisanya 21,79 persen untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Berdasarkan informasi di lapangan diketahui bahwa, karena pada perkembangan selanjutnya dana PDM-DKE bukanlah monopoli dari sekelompok orang, melainkan hak dari seluruh masyarakat yang memang dianggap tidak mampu, maka pengurus merasa kesulitan apabila harus membatasi pada sasaran kegiatan tertentu saja, yaitu untuk modal usaha, maupun dagang. Pengurus biasanya tidak bisa tegas dengan anggota pokmas. Apalagi dana PDM-DKE merupakan dana JPS yang memang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu, dan merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terkena krisis ekonomi. Dengan demikian tidak ada alasan yang kuat bagi pengurus untuk tidak meloloskan permintaan anggota masyarakat seandainya membutuhkan pinjaman uang. *Ini membuktikan bahwa tidak semuanya program PDM-DKE memenuhi sasaran kegiatan yang diharapkan yaitu sebagai penggerak ekonomi produktif.*

Namun demikian, menurut beberapa responden diketahui bahwa uang JPS-PDM-DKE ini sangat membantu masyarakat yang tidak mampu. Bukti kongkrit dari manfaat ini adalah semakin langkanya kredit harian yang berkeliling di desa. Saat ini kegiatan **kredit harian** yang beroperasi desa sangat berkurang, karena di desa sendiri sudah ada beberapa fasilitas kredit untuk orang tidak mampu, dengan bunga/jasa yang sangat rendah.

Antusiasme anggota masyarakat dalam meminjam ini dapat dilihat dari data yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel:21 Distribusi frekwensi rata-rata pemanfaatan dana oleh anggota pokmas (selama 18 bulan).

	Frekwensi Peminjaman uang	Frek	%
A	1 kali	30	38,46
B	2 kali	39	50,00
c	Lebih dari 2 kali	9	11,54
Jumlah		78	100,00

Sumber : Data Primer diolah,

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anggota pokmas telah beberapa kali memanfaatkan dana PDM-DKE untuk pinjaman. Dari data tersebut bahkan ada yang sudah lebih dari dua kali memanfaatkan dana tersebut, untuk kurun waktu 18 bulan, yaitu sebanyak 11, 54 persen

Sayangnya kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat sering tidak diimbangi dengan kesadaran yang tinggi untuk melestarikan kegiatan simpan pinjam yang berasal dari dana tersebut. Di beberapa desa seperti desa Notog dan Kedungrandu, kegiatan simpan pinjam ini hampir sepertiganya mengalami kemacetan, dimana para anggota pokmas tidak secara rutin mengembalikan pinjamannya. Bahkan ada yang sama sekali tiak mau mengangsur. Untuk memperkuta ini di bawah ini disajikan tentang rutinitas anggota masyarakat dalam menembalikan pinjamannya.

Tabel 22. Distribusi frekwensi rutinitas pengembalian dana Pinjaman

	Rutinitas Pengembalian Pinjaman	Frek	%
A	Ya	46	58,09
B	Tidak	32	41,91
Jumlah		105	100

Sumber : Data Primer diolah,

Data tersebut memeplihatkan bahwa, yang secara rutin mengangusur hanyalah 58 persen anggota masyarakat, sedangkan selebihnya yaitu 41,91 persen tidak secara rutin mengangsur dan mengalami kemacetan untuk mengangsur.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, Sistem pengelolaan program PDM-DKE dengan menggunakan pola pokmas, yang didasarkan atas jenis usaha dan kegiatan ternyata tidak menjamin keberlangsungan suatu program. Namun demikian pola ini lebih mengena pada sasaran yang diinginkan. Sedangkan sistem pengelolaan dengangan menggunakan Institusi RT dan RW aakan cenderung menjamin keberlangsungan program. Namun demikian sasaran program menjadi tidak terarah.

Kedua, masyarakat ternyata lebih suka memanfaatkan dana PDM-DKE sebagai modal usaha dan simpan pinjam. Hal ini terbukti sebagian besar dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan tersebut.

Ketiga, Pemanfaatan dana untuk kegitan simpan pinjam, cenderung kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran program, yaitu untuk kegiatan produktif. Masyarakat cenderung melihatnya sebagai dana murah yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Namun demikian hal ini tidak menjamin bahwa mereka mencoba melestarikan keutuhan dana tersebut bagi kepentingan bersama masyarakat. Banyaknya anggota masyarakat yang macet dalam pengembalian hutang merupakan contoh akan hal ini.

Universitas Terbuka

VI . KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis di depan maka dapat disimpulkan bahwa program penyaluran dana jaring pengaman sosial (JPS) PDM-DKE membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Namun demikian manfaat yang besar ini tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang tepat, sehingga sasaran dari program untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif tidak dapat tercapai secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana program JPS PDM-DKE di Kecamatan Patikraja, kurang mengena sasaran penerima program maupun sasaran kegiatan program. Hal ini disebabkan oleh :

1. Sistem pengelolaan program yang kurang pas/cocok dengan kondisi masyarakat. Pola penyaluran dengan menggunakan kelompok masyarakat berdasarkan sasaran kegiatan dapat mengena sasaran penerima program dan kegiatan, namun tidak menjamin keberlangsungan program, sehingga tujuan *revolving* atas dana JPS kurang dapat tercapai. Apalagi pembentukan pokmas pada pola pertama ini cenderung bersifat instan, tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Namun demikian dengan pola penyaluran menggunakan institusi RW dan RT ternyata lebih menjamin kontinuitas dan keberlanjutan program, namun pola ini tidak mengena pada sasaran

baik sasaran kegiatan maupun sasaran penerima program. Pada pola kedua ini semua anggota RT dan RW merasa berhak untuk menjadi anggota Pokmas.

2. Akibat dari pola dan sistem penyaluran yang kurang sesuai, maka pemanfaatan dana di kelompok sasaran cenderung untuk tidak mencapai sasaran. Tujuan program adalah untuk kegiatan ekonomi produktif, namun ternyata banyak kelompok masyarakat yang memanfaatkan dana program juga untuk kegiatan lain seperti kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lain yang mendesak.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat di ajukan dalam laporan penelitian ini antara lain.

1. Pola penyaluran dana program JPS tidak harus sama antara desa yang satu dengan desa yang lain, namun disesuaikan dengan kondisi desa setempat, sehingga pola pembentukan pokmas di tingkat desa akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula diharapkan keberlanjutan program yaitu revolving dapat dijaga keberlangsungannya.
2. Kurang konsistennya sasaran kegiatan di tingkat pokmas memerlukan fleksibilitas pemanfaatan dana program, sehingga masyarakat tidak terbatas pada pergerakan ekonomi masyarakat. Hal ini karena penstabilan kehidupan ekonomi masyarakat tidak harus selalu

memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, melainkan lebih pada penyadaran masyarakat ke arah perilaku produktif.

3. Bagaimanapun baiknya program, maka perlu diikuti dengan pembinaan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka menciptakan kemandirian.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999, *Pedoman Umum Program Perluasan JPS dan Pemberdayaan Masyarakat*, Tim Kordinasi P3JPS PM Tahun anggaran 1999/2000, Banyumas
- Brannen, Julia, 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alih Bahasa: Imam Safe'I dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William, 1987, *Analisa Kebijakan Publik*, Hanindita Offset, Yogyakarta
- Eade, Deborah, 1997, *Capacity Building: and approach to People Centered Development*, Oxfarm, UK.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Faozanudin, Muslih dan Lilis Sri S, 1995 *Efektifitas Pendayagunaan Dana IDT (Analisis Tentang Efektifitas Pengalokasian Dana IDT dan Pemilihan Jenis Usaha Dalam Program IDT di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang, Kabupaten Dati II*, tidak dipublikasikan
- Friedman, John, 1991, *Empowerment: The Politic of Alternative Development*, Blackwell, Cambridge, UK
- King, John A, et. all, 1987, *How to Asses Program Implementation*, Sage Publication, London
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1984. *Qualitative Data Analysis: a Sourcebook of New Methods*, Publication, Beverly Hills.
- Rutman, Leonard, 1980, *Planning Usefull Evaluations: Evaluability Assesment*, Sage Publiocation, London.
- Smith, H.W. , 1981, *Strategies of Social Research: The Methodological Imagination*, Prentice Hall, New Jersey.
- Tjipto Heriyanto, Priono, 1997: *Pembangunan Jaringan Ekonomi Pedesaan dalam Upaya Pengentasan Penduduk Miskin di Daerah Tidak tertinggal*, Analisis CSIS.
- Vredenburg, J (1984), *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Gramedia Jakarta.
- Wahab, AS, 1991, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Wibawa, Samodra, dkk., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Pers, Jakarta

Wibawa Samodra, 1994, *Kebijakan publik: Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.

Lain-lain:

Anonim, Nota keuangan dan RAPBN tahun 1999/2000

Kompas, 17 Mei 1999: *JPS dan Bank Dunia*

Kompas 17 Mei 1999: *Seputar Konsep JPS*

Republika 26 April 1999, *JPS obat generik, IMF untuk sakit*

Republika 26 april 1999, *Pengerat Dana JPS Birokrat level atas sampai RT/RW*

BPS, data tahun 1996 Jakarta ,

Universitas Terbuka

**Q1. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP APARAT/UNIT YANG
TERLIBAT DALAM PROSES IMPLEMENTASI JPS PDM-DKE
TINGKAT KECAMATAN DAN DESA**

I. Identitas Responden:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Instansi :

II. Penentuan Kelompok Sasaran

1. Bagaimana proses penentuan kelompok sasaran dalam penyaluran dana JPSPDM-DKE ?
2. Bagaimana tingkat keterlibatan aparat dalam ikut menentukan kelompok sasaran
3. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan kelompok sasaran ?
4. Bagaimana fungsi aparat pemerintah dalam penentuan kelompok sasaran ?
5. Bagaimana fungsi Fasilitator dalam penentuan kelompok sasaran ?
6. Bagaimana sistem kontrol penyaluan yang digunakan ?

III. Cara Pengalokasian Dana

1. Apakah Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan jenis usaha ?
2. Bagaimana fungsi aparat pemerintah dalam proses penyaluran dana ?
3. Bagaimana fungsi Fasilitator dalam proses penyaluran dana ?
4. Bagaimana proses penentuan jenis bidang usaha bagi Kelompok sasaran ?
5. Bagaimana sistem kontrol penyaluan yang digunakan ?

IV. Sistem Pengelolaan dana

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana JPS PDM-DKE ?
2. Apakah ada ketentuan yang secara khusus mengatur sistem pengelolaan dana JPS ?
3. Apakah masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur sendiri dana tersebut ?
4. Bagaimana sistem pengawasan ?

---S---

**Q2: DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT
DALAM PROSES IMPLEMENTASI JPS**

I. Identitas Personal

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Nama Pokmas :
6. Jenis Kegiatan Pokmas :

II. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan JPS PDM-DKE

1. Apakah Saudara tahu siapa yang mengelola Program JPS ?
 - a. Ya (*Langsung ke Pertanyaan No. 3*)
 - b. Tidak
2. Kalau Tidak, apa alasannya ? jelaskan !

3. Apakah Saudara setuju dengan model pengelolaan program JPS seperti saat ini
 - a. Ya (*Langsung ke Pertanyaan No. 5*)
 - b. Tidak
4. Kalau Tidak, apa alasannya ? jelaskan !

5. Apakah Saudara tahu bagaimana perkembangan dana JPS ?
 - a. Ya (*Langsung ke Pertanyaan No. 7*)
 - b. tidak
6. Kalau Tidak, apa alasannya ?

7. Apakah ada kegiatan rapat rutin untuk mengecek perkembangan dana JPS PDM-DKE ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat 'Efektifitas Implementasi Program JPS'

III. Pemanfaatan dana JPS PDM-DKE

8. Berapa Saudara meminjam/menggunakan dana PDM-DKE ?

- a Kurang dari 200. 000
- b 200,000 s/d 300.000
- c Lebih dari 300.000

9. Untuk apa dana yang saudara terima dari JPS PDM-DKE ?

- a Modal usaha /dagang
- b Kebutuhan konsumsi
- c Kebutuhan lain yang mendesak

9. Sudah berapa kali Saudara menggunakan/meminjam dana JPS

- A 1 kali
- b 2 kali
- c Lebih dari 2 kali

10. Apakah Saudara secara rutin mengembalikan pinjaman ?

- a. Ya (langsung pertanyaan No. 12)
- b. Tidak

11. Kalau *tidak* apa alasannya ? jelaskan !

.....

IV. Tingkat Manfaat Dana Bagi Masyarakat ?

12. Apakah Saudara merasa bahwa dana JPS- bermanfaat ?

- a. Ya
- b. Tidak (Langsung pertanyaan No.14)

13. Kalau 'Ya ', apa jenis manfaat yang sdaura dapatkan ?

.....

14. Kalau 'Tidak" mengapa ? jelaskan ?

.....

15. Apa saran saudara mengenai bagaimana sebaiknya dana JPS ini dikelola ?

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat 'Efektifitas Implementasi Program JPS'

RIWAYAT HIDUP PENELITI

I. Ketua Peneliti:

1. N a m a : Dra. Sri Weningsih
2. Unit : UPBJJ-UT Purwokerto
3. Pangkat/Gol/NIP. : Penata /IIIId/131 787 023
4. Jabatan sekarang : Lektor
5. Pendidikan : Sarjana Ilmu Administrasi Negara

II. Pengalaman Penelitian:

Tahun	Judul Penelitian
1999	Analisis Sistem Kelembagaan Dan Efektifitas Pelaksanaan Urusan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Dati II Banyumas.
1998	Otonomi Daerah Tingkat II (Analisis Orientasi Budaya Administrasi Dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanan Otonomi Daerah Di Kabupaten Dati II Banyumas)
1994	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Sistem Unit Daerah Kerja pembangunan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cilacap Utara Kab. Dati II Cilacap.
1993	Peranan Pengoperasian Armada Paket Pos dan Sumber Daya Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Paket Pos Pada Kantor Pos dan Giri Besar Purwokerto.
1993	Faktor-faktor yang menghambat guru-guru SD mengikuti Program Penyetaraan D-II Guru SD Swadana di Kabupaten Banjarnegara.
1991	Animo Masyarakat Masuk Program Penyetaraan D-II Guru SD Swadana di Kotatip Purwokerto
1991	Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan terhadap Semangat Kerja Pegawai (Studi Kasus di PT. Taspem Cabang Purwokerto
1990	Pengaruh Pengawasan dan Semangat Kerja terhadap Disiplin Kerja Pegawai (Studi Kasus di Kantor Depnaker Banyumas)
1989	Tingkat Pengenalan Siswa SMA Terhadap UT di Kotatip Purwokerto.

Yang bersangkutan

Ttd

Dra. Sri Weningsih

RIWAYAT HIDUP PENELITI

2. Penelitian 1:

1. N a m a : Drs. Muslih Faozanudin, M.Sc.
 2. Unit : FISIP Unsoed Purwokerto
 3. Pangkat/Gol/NIP. : Penata /IIIc/131 996101
 4. Jabatan sekarang : Lektor Muda
 5. Pendidikan : - Sarjana Ilmu Administrasi Negara
 - Master in Economic Development and Policy

6. Pengalaman Penelitian:

Tahun	Judul Penelitian
1999	Analisis Sistem Pelaporan Bantuan Keuangan Pusat Di Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Daerah (Tim Peneliti Bappenas)
1998	The Role Of Sector-Based Strategies For Developing Local Economies
1996	Otonomi Daerah Tingkat II (Analisis Orientasi Budaya Administrasi Dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Dati II Banyumas)
1996	Analisis Sistem Kelembagaan Dan Efektifitas Pelaksanaan Urusan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Dati II Banyumas.
1996	Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kabupaten Dati II Banyumas Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba Otonomi Daerah Tingkat II)
1995	Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Dati II Banyumas Dalam Rangka Pilot Project
1995	Efektifitas Pendayagunaan Dana IDT (Analisis Tentang Efektifitas Pengalokasian Dana IDT Dan Pemilihan Jenis Usaha Dalam Program IDT Di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang, Kabupaten Dati II Banyumas: Ketua Peneliti
1994	Peranan Pengawasan Dalam Hubungannya Dengan Tingkat Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dati II Banyumas
1994	Rencana Rehabilitasi Pasar Wage (Analisis Kemungkinan Tentang Kelangsungan Berusaha Bagi Retailer Bisnis

Yang bersangkutan

Ttd.

Drs. Muslih Faozanudin, M.Sc.